

**STRATEGI NICOLAS SARKOZY MENDAPATKAN  
DUKUNGAN OPINI PUBLIK PRANCIS TERKAIT  
KEBIJAKAN REINTEGRASI PRANCIS DALAM NATO**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**DWI APRIYOGO**

**070810508**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**SEMESTER GENAP 2011/2012**

**STRATEGI NICOLAS SARKOZY MENDAPATKAN  
DUKUNGAN OPINI PUBLIK PRANCIS TERKAIT  
KEBIJAKAN REINTEGRASI PRANCIS DALAM NATO**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Studi S-1 pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Airlangga**

**Disusun Oleh:**

**DWI APRIYOGO**

**070810508**

**Pembimbing**

**Anne F. Guttinger, DEA, Ph.D. Candidate**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**SEMESTER GENAP 2011/2012**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

### **SKRIPSI**

#### **STRATEGI NICOLAS SARKOZY MENDAPATKAN DUKUNGAN OPINI PUBLIK PRANCIS TERKAIT KEBIJAKAN REINTEGRASI PRANCIS DALAM NATO**

#### **Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat**

Bagian atau keseluruhan isi skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan atau ditulis oleh individu selain penulis dengan format kutipan dalam skripsi.

Surabaya, 4 Juni 2012

Penulis,

Dwi Apriyogo

## HALAMAN PERSETUJUAN

### SKRIPSI

#### STRATEGI NICOLAS SARKOZY MENDAPATKAN DUKUNGAN OPINI PUBLIK PRANCIS TERKAIT KEBIJAKAN REINTEGRASI PRANCIS

#### DALAM NATO

telah disetujui untuk diujikan Komisi Penguji

Surabaya, 4 Juni 2012

Dosen Pembimbing

Anne Francois Guttinger, DEA, Ph.D. Candidate.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Baiq L.S.W. Wardhani, Ph.D.  
NIP 19640331 198810 2 001

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “STRATEGI NICOLAS SARKOZY  
MENDAPATKAN DUKUNGAN OPINI PUBLIK PRANCIS TERKAIT  
KEBIJAKAN REINTEGRASI PRANCIS DALAM NATO” ini telah  
dipertahankan di hadapan Komisi Penguji pada hari Senin, 4 Juni 2012 di  
Ruang Cakra Gedung B Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Airlangga

Komisi Penguji,

Ketua,

**Baiq L.S.W. Wardhani, Ph.D.**  
NIP 19640331 198810 2 001

Anggota,

Anggota,

**Ajar Triharsono, MS.**  
NIP 19521202 198303 1 001

**Citra Hennida, S,IP,MA**  
NIP 19791025 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Nicolas Sarkozy Mendapatkan Dukungan Opini Publik Prancis Terkait Kebijakan Reintegrasi Prancis dalam NATO”. Dalam selesainya penulisan ini tak lepas dari dukungan dan bantuan banyak di pihak. Oleh karena itu, pertama-tama penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi sesuai dengan target.

Kedua, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Madame Anne F. Guttinger selaku pembimbing penulis yang secara sabar menjadi pemandu bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada Abir yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-temanku, HI angkatan 2008, sungguh banyak kenangan dan perjuangan yang kita lalui. Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada kalian terutama teman Kos BPK, DPR dan RMS. Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran dosen HI Universitas Airlangga yang selama 4 tahun ini membagikan ilmunya kepada penulis.

Penulis sadar bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna. Namun, penulis berharap tulisan ini menjadi inspirasi untuk penelitian selanjutnya yaitu penelitian mengenai opini publik dan peran aktor politik.

Surabaya, 4 Juni 2012

Penulis





## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
I.1. Latar Belakang Masalah .....	1
I.2. Rumusan Masalah .....	6
I.3. Tujuan Penelitian .....	6
I.4. Kerangka Pemikiran .....	6
I.4.I. Volatilitas Opini Publik .....	7
I.4.II. <i>Theory of Public Appeals</i> .....	8
I.4.III. Konsep Pemasaran Politik .....	9
I.4.IV. <i>Crafted Talk</i> .....	11
I.5. Sintesis Kerangka Pemikiran .....	12
I.6. Hipotesis .....	13
I.7. Metodologi Penelitian .....	13
I.7.I. Definisi Konseptual .....	13
I.7.I.1. Opini Publik .....	14
I.7.I.2. <i>Public Appeals</i> .....	15



I.7.I.3. Komunikasi .....	15
I.7.II. Definisi Operasional.....	16
I.7.II.1. Opini Publik.....	16
I.7.II.2. <i>Public Appeals</i> .....	16
I.7.II.3. Komunikasi .....	16
I.7.III. Tipe Penelitian .....	17
I.7.IV. Jangkauan Penelitian .....	17
I.7.V. Teknik Pengumpulan Data.....	17
I.7.V. Teknik Analisis Data.....	18
I.7.VI. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II PUBLIK PRANCIS TERHADAP KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN PRANCIS</b> .....	20
II.1. Karakteristik Opini Publik Prancis.....	20
II.1.I. Anti Amerikanisme di Prancis.....	21
II.1.II. Gaullisme dalam Opini Publik Prancis .....	25
II.2. Opini Publik Prancis terhadap Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Prancis .....	30
II.2.I. Opini Publik Prancis terhadap Kebijakan Reintegrasi dalam NATO .....	31
II.2.II. Opini Publik Prancis terhadap Kebijakan Memperkuat EU CSDP.....	36
II.3. Analisis Volatilitas Opini Publik Prancis.....	39
<b>BAB III KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN PRANCIS: KORELASI KEBIJAKAN REINTEGRASI DALAM NATO DENGAN KEBIJAKAN MEMPERKUAT EU CSDP</b> .....	41
III.1. Kebijakan Reintegrasi Prancis dalam NATO.....	41
III.1.I. Sejarah Kerjasama Prancis dengan NATO.....	42

III.1.II. Hubungan Prancis dengan NATO pada Masa Pemerintahan Nicolas Sarkozy .....	46
III.1.III. Kepentingan Prancis dalam NATO.....	50
III.2. Kebijakan Memperkuat EU CSDP.....	55
III.2.I. Sejarah EU CSDP .....	56
III.2.II. Kepentingan Prancis dalam EU CSDP.....	59
III.3. Analisis Korelasi antara Kebijakan Reintegrasi dalam NATO dengan Kebijakan Memperkuat EU CSDP .....	62
<b>BAB IV SARKOZY, MEDIA DAN KEBIJAKAN REINTEGRASI DALAM NATO .....</b>	<b>67</b>
IV.1. Peran Media dalam Sosial Politik .....	67
IV.2. Karakteristik Media di Prancis .....	71
IV.3. Pengaruh Nicolas Sarkozy terhadap Media di Prancis.....	76
IV.4. Publikasi Kebijakan Reintegrasi Prancis dalam NATO dalam Media.....	81
IV.5. Analisa Peran Media sebagai Alat Pemasaran Politik Nicolas Sarkozy .....	84
<b>BAB V. KESIMPULAN.....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Dukungan Opini Publik Prancis terhadap NATO 1976-78 & 1994-96 .....	4
Tabel I.2. Tabel Sintesis Kerangka Pemikiran.....	12
Tabel II.1. Jajak Pendapat Opini Publik Prancis terhadap AS.....	23
Tabel II.2. Jajak Pendapat Penilaian Opini Publik Prancis terhadap Presiden-presiden Prancis .....	26
Tabel II.3. Jajak Pendapat Opini Publik terhadap Kebijakan Charles de Gaulle .....	27
Tabel II.4. Jajak Pendapat Opini Publik Prancis mengenai Independensi Prancis .....	29
Tabel II.5. Opini Publik Prancis terhadap AS.....	31
Tabel II.6. Opini Publik Prancis terhadap Operasi Militer NATO do Afghanistan .....	32
Tabel II.7. Jajak Pendapat terhadap NATO .....	34
Tabel II.8. Jajak Pendapat Dukungan Opini Publik Prancis terhadap ISAF.....	36
Tabel II.9. Jajak Pendapat Dukungan Opini Publik Prancis terhadap ESDP .....	38
Tabel IV.1. Afiliasi Politik Media Massa Prancis.....	73
Tabel IV.2. Kepemilikan Media Massa di Prancis .....	77
Tabel IV.2. <i>Les Echos</i> .....	82
Tabel IV.3. <i>Le Monde Diplomatique</i> .....	83
Tabel IV.4. <i>Le Nouvel Observateur</i> .....	83

## ABSTRAK

Penelitian ini menelaah mengenai pengaruh dari Nicolas Sarkozy dalam mendapatkan dukungan opini publik Prancis terkait kebijakan reintegrasi Prancis ke dalam NATO. Latar belakang dari penelitian ini adalah argumen dari Brandice Canes-Wrone yang menyatakan bahwa presiden ikut campur dalam membentuk opini publik terkait kebijakan luar negeri. Opini publik Prancis menilai NATO sebagai penghalang kepentingan dan independensi Prancis. Fakta tersebut menuntut Nicolas Sarkozy untuk mengubah opini publik agar mendukung kebijakan reintegrasi Prancis ke dalam NATO. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga popularitas dari seorang presiden dalam pemerintahan dan mendapatkan kepentingan nasional dalam NATO. Permasalahan tersebut ditelaah secara deskriptif dalam menganalisa hubungan antara presiden dengan opini publik. Analisis menunjukkan bahwa Nicolas Sarkozy mendapatkan dukungan dari opini publik terkait kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO dengan menggunakan dua strategi persuasif. Strategi tersebut dilaksanakan dengan menggunakan media massa dan kebijakan stimulan. Nicolas Sarkozy yang menguasai media massa di Prancis mempermudah Nicolas Sarkozy mempublikasikan justifikasi atas kebijakan reintegrasi dalam NATO. Kebijakan memperkuat EU CSDP (*European Union Common Security and Defence Policy*) dijadikan stimulan oleh Nicolas Sarkozy untuk mendapatkan dukungan opini publik.

Kata kunci: Nicolas Sarkozy, opini publik, media, kebijakan reintegrasi dalam NATO.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan reintegrasi Prancis dalam struktur komando NATO merupakan kebijakan yang kontroversial pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy. Hal ini dikarenakan Nicolas Sarkozy keluar dari independensi militer yang sudah diterapkan semenjak Charles de Gaulle menyatakan Prancis keluar dari NATO pada tahun 1966. Pada April 2009, Prancis akhirnya kembali masuk dalam komando militer dari NATO setelah 43 tahun independensi pertahanan dan militer. Kebijakan reintegrasi dalam NATO ini ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari Majelis Nasional Prancis dengan perbandingan 329-298 pada 17 Maret 2009<sup>1</sup>. Setelah masuk kembali dalam keanggotaan militer NATO, Prancis merupakan negara terbesar keempat pasukan militer yang ada di NATO<sup>2</sup>.

Dalam proses dari pembentukan kebijakan ini terdapat banyak perdebatan baik dalam pemerintahan maupun dalam opini publik. Hal ini dikarenakan sudah lama terdapat sikap Anti-Amerikanisme di Prancis<sup>3</sup>. Munculnya sikap Anti-Amerikanisme diawali oleh pemikiran Gaullisme<sup>4</sup>. Segala sesuatu yang

---

<sup>1</sup> Paul Belkin, 2011. *France: Factors Shaping Foreign Policy and Issues in US-French Relations*. Congressional Research Service, 7-5700 dalam [www.crs.com](http://www.crs.com) RL32464, 13.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Marcel H. Van Herpen, 2008. *Sarkozy, France and NATO: Will Sarkozy's Rapprochement to NATO be Sustainable?*. terdapat dalam <http://www.nationalinterest.org/Article.aspx?id=17514>, 13.

<sup>4</sup> Ibid.



berhubungan dengan Amerika Serikat merupakan sasaran dari pemikiran ini, termasuk NATO. Opini publik Prancis sebagian besar tidak puas dengan kebijakan reintegrasi dalam NATO. Para politisi Prancis terutama oposisi dari pemerintahan Nicolas Sarkozy seperti dari golongan sayap kanan mengkritik kebijakan tersebut. Karena hal tersebut menciderai nasionalisme Prancis yang dibangun selama kurang lebih 43 tahun oleh Charles de Gaulle dan para suksesornya<sup>5</sup>.

Charles de Gaulle adalah mantan Presiden Prancis yang berhasil membangkitkan kembali nasionalisme Prancis. Nasionalisme yang berkembang di Prancis lekat dengan unsur Anti Amerikanisme. Kebijakan *Marshall Plan* yang pada waktu itu dikeluarkan oleh Amerika Serikat kepada negara-negara Eropa tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat Prancis. Hal tersebut dikarenakan Prancis menganggap bahwa *Marshall Plan* hanya merupakan implementasi kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Eropa dan memperbudak Prancis secara ekonomi dan budaya<sup>6</sup>. Bahkan pada jajak pendapat yang dilakukan pada tahun 1944 tentang pertanyaan siapa yang mempunyai kontribusi dalam kekalahan Jerman, 61% untuk kontribusi Uni Soviet dan 29% untuk Amerika Serikat<sup>7</sup>. Perang Vietnam dan keluarnya Charles de Gaulle dari NATO merupakan dua kejadian yang membuat Anti-Amerikanisme di Prancis semakin kuat. Pencitraan

---

<sup>5</sup> Paul Belkin, 2011. *France: Factors Shaping Foreign Policy and Issues in US-French Relations*. Congressional Research Service 7-5700 dalam [www.crs.com](http://www.crs.com) RL32464, 15.

<sup>6</sup> Grzegorz B. Grabinski. 2005, *Anti Americanism in Europe: A History Disease*. The Atlantic Obsevers, 20.

<sup>7</sup> Ibid.

Amerika Serikat menjadi buruk di mata masyarakat Prancis karena mereka terancam akan kekuatan imperialistik baru yang dimiliki oleh Amerika Serikat.

Pemerintahan Prancis dalam dua dekade terakhir juga menunjukkan kedekatan kepada Amerika Serikat. Pada tahun 1993 Prancis mulai mendukung inisiatif NATO dalam penyelesaian konflik Yugoslavia<sup>8</sup>. Pada masa pemerintahan Jacques Chirac, arah dari kebijakan keamanan dan pertahanan Eropa semakin dekat kepada Amerika Serikat<sup>9</sup>. Hal tersebut dilakukan dengan adanya rencana masuknya Prancis kembali pada komando militer NATO. Langkah tersebut dilakukan karena independensi pertahanan dan keamanan yang dilakukan Prancis tidak relevan lagi<sup>10</sup>.

Pada dekade kedekatan antara NATO dengan Prancis ini didukung dengan adanya opini publik Prancis yang semakin mendukung NATO. Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa jajak pendapat yang ada mengenai NATO. Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa pada tahun 1994-1996 terjadi peningkatan prosentase dari dukungan opini publik Prancis terhadap NATO yaitu:

---

<sup>8</sup> Anand Menon. 1995. *From Independence to Cooperation: France, NATO and European Security*.

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 71, No. 1 (Jan., 1995), 26-27.

<sup>9</sup> Marcel H. Van Herpen, 2008. *Sarkozy, France and NATO: Will Sarkozy's Rapprochement to NATO be Sustainable?*. terdapat dalam <http://www.nationalinterest.org/Article.aspx?id=17514>, 8.

<sup>10</sup> Menon, Op. Cit., 22



**Tabel I.1. Dukungan Opini Publik Prancis terhadap  
NATO 1976-78 & 1994-96**

Tahun	Prosentase
1976	42%
1977	44%
1978	39%
1994	58%
1995	60%
1996	54%

Sumber diolah dari Andrew H. Ziegler, Jr., 1998. *European Public Perceptions of the Atlantic Alliance: Implications for Post-Cold War Security Policy*, Final Research Report Submitted in Fulfillment of a 1996-1998 Research Fellowship Awarded by the North Atlantic Treaty Organization Brussels, Belgium, 30 June 1998, 16.

Hubungan antara Chirac dengan Amerika Serikat menjadi buruk dengan penolakan dan kecaman Chirac terhadap invasi Amerika Serikat ke Irak. Pada masa kepemimpinan dari Jacques Chirac, terdapat jajak pendapat mengenai penilaian opini publik Prancis terhadap Amerika Serikat. Hasil dari jajak pendapat yang dilakukan antara tahun 2000-2003 bahwa 56% menunjukkan bahwa opini publik Prancis masih memandang negatif Amerika Serikat<sup>11</sup>. Bagi publik Prancis AS dipandang dari segi negatifnya meliputi karakteristik Amerika Serikat yang lekat dengan kekerasan, obat terlarang dan senjata ilegal serta budaya yang inferior. Puncak dari kedekatan Prancis dengan Amerika Serikat adalah pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy yang mengeluarkan kebijakan reintegrasi penuh Prancis dalam NATO. Tetapi, dalam integrasinya kembali dalam NATO Prancis

<sup>11</sup> Denis Lacorne, 2005. *Anti-Americanism and Americanophobia: A French Perspective*. s.l. 2.

tidak mengikutsertakan diri dalam dua komite yaitu *Defense Planning and Nuclear Planning*<sup>12</sup>.

Meskipun kebijakan yang ditetapkan oleh Nicolas Sarkozy tidak mendapatkan banyak dukungan dari opini publik negaranya berdasar kepada fakta sejarah dukungan opini publik tersebut di atas. Nicolas Sarkozy tetap mengomunikasikan rancangan kebijakannya kepada jajaran pemerintahan Prancis. Nicolas Sarkozy menyampaikan rancangan kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO untuk pertama kali pada 27 Agustus 2007 di hadapan para duta besar Prancis<sup>13</sup>.

Perubahan dukungan opini publik Prancis terhadap NATO terjadi pada tahun 2009. Jajak pendapat yang dilakukan pada tahun 2009 menunjukkan bahwa opini publik Prancis mulai mendukung reintegrasi Prancis dalam NATO sebesar 58% dan 37% menolak<sup>14</sup>. Pada tahun 2011, setelah dua tahun Prancis menjadi anggota penuh NATO, terdapat jajak pendapat yang menunjukkan bahwa 70% opini publik Prancis mendukung NATO<sup>15</sup>. Fakta tersebut menunjukkan adanya peningkatan dukungan opini publik Prancis terhadap NATO. Opini publik merupakan subjek yang mempunyai volatilitas tinggi dan mudah terpengaruh oleh

<sup>12</sup> Justin Vaisse. 2008. *Nicolas Sarkozy's Foreign Policy: Gaullist by Any Other Name*. The International Institute for Strategies Studies, terdapat dalam [www.informaworld.com/survival](http://www.informaworld.com/survival), 2.

<sup>13</sup> Gisela M.R. Bacquet, 2009. *France's New NATO Policy: Leveraging a Realignment of the Alliance*. Dalam "The Foreign Policy of USA: President Obama's New Course and the Future of Transatlantic Relations, 8.

<sup>14</sup> "France rejoining NATO command good news for Moscow". 2009. Terdapat dalam <http://rt.com/usa/news/france-rejoining-nato-command-good-news-for-moscow/>, diakses pada [15 Januari 2012].

<sup>15</sup> Pew Research Center. 2011. *Pew Global Attitudes: Opinions of NATO 2010-2011*. Terdapat dalam <http://www.pewglobal.org/database/?indicator=37&survey=13&response=Favorable&mode=chart>, diakses pada [2 Mei 2012].

banyak faktor, salah satunya adalah politisi<sup>16</sup>. Brandice Canes-Wrone menyatakan bahwa dalam kebijakan luar negeri sering kali presiden ikut campur dalam membentuk opini publik untuk mencapai kepentingannya<sup>17</sup>.

Perubahan dukungan opini publik Prancis terhadap NATO menjadi menarik bagi peneliti untuk dianalisa lebih jauh lagi. Peneliti berfokus kepada peran Nicolas Sarkozy dalam perubahan opini publik Prancis terkait kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah dari penelitian ini adalah: bagaimana Nicholas Sarkozy mendapatkan dukungan opini publik Prancis terkait kebijakan reintegrasi dalam NATO?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi Nicolas Sarkozy mendapatkan dukungan opini publik Prancis terkait kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO. Untuk menjelaskan hal tersebut, peneliti membutuhkan tujuan lain, yaitu, mengetahui strategi atau cara yang dilakukan oleh Nicolas Sarkozy untuk mendapatkan dukungan opini publik.

## **I.4. Kerangka Pemikiran**

---

<sup>16</sup> Public Opinion". 2012. In *Encyclopædia Britannica*. Terdapat dalam <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/482436/public-opinion>, diakses pada [26 Mei 2012].

<sup>17</sup> Brandice Canes-Wrone, 2006. *Who Leads Whom? President, Policy and Public Opinion*. Chicago: Chicago University Press, 4-5.

Dalam penelitian digunakan beberapa teori dan konsep sebagai alat bagi penulis untuk mengetahui dan menganalisa peran dan cara pemerintahan Nicolas Sarkozy dalam mendapatkan dukungan opini publik Prancis. Berikut adalah teori dan konsep yang penulis gunakan:

#### **1.4.1. Volatilitas Opini Publik**

Opini publik merupakan subjek dalam sosiologi politik yang mempunyai karakteristik tidak rasional, emosional, tidak memiliki orientasi yang jelas, dan tidak mempunyai informasi<sup>18</sup>. Opini publik merupakan subjek yang sulit untuk diprediksi karena karakteristik yang dimilikinya tersebut di atas. Dalam kebijakan atau urusan luar negeri suatu negara, opini publik sering tidak mempunyai informasi yang memadai. Sehingga hal tersebut menimbulkan interpretasi yang salah dari opini publik dari permasalahan yang sedang dihadapi negara. Terdapat tiga proposisi yang menggambarkan kondisi dari opini publik<sup>19</sup>:

- Opini publik mempunyai volatilitas yang tinggi dan hal tersebut menyebabkan timbulnya keraguan terhadap penilaian opini publik terhadap kebijakan luar negeri.
- Perilaku dari publik dalam permasalahan internasional tidak mempunyai struktur dan koherensi sehingga bisa dikatakan sebagai non-opini.
- Pengaruh dari opini publik terbatas terhadap kebijakan luar negeri.

---

<sup>18</sup> Ole R. Holsti, 2004. *Public Opinion and American Foreign Policy*. University of Michigan Press, 7-8.

<sup>19</sup> Ibid., 28.

Opini publik juga mempunyai karakteristik menilai suatu fenomena berdasarkan kepada lingkungan dimana mereka tinggal. Hal tersebut disebut juga dengan *pseudo-environment* yang menyatakan bahwa lingkungan luar terlalu luas, kompleks dan cepat berlalu untuk dikenali secara langsung oleh opini publik<sup>20</sup>. Opini publik tidak menerima fakta sebagai fakta. Tetapi menerima fakta sebagai hal yang mereka artikan sebagai fakta atau sesuai dengan interpretasi mereka. Hal tersebut merupakan salah satu alasan opini publik mempunyai volatilitas yang tinggi.

#### **I.4.II. *Theory of Public Appeals***

Teori ini membahas mengenai presiden atau pembuat keputusan menggunakan permasalahan atau kebijakan lain untuk meloloskan kebijakan yang sebelumnya mendapatkan penolakan dari publik<sup>21</sup>. Ketika seorang pembuat keputusan mendapatkan tekanan yaitu penolakan yang besar dari publik, maka pembuat keputusan kemudian bisa memunculkan masalah lain atau kebijakan lain yang bisa menjadi stimulan atau sebagai strategi persuasif dari pembuat keputusan agar publik menyetujui kebijakan yang sebelumnya ditolak. Terdapat tiga pihak yang disebutkan oleh Canes-Wrone dalam bukunya yaitu<sup>22</sup>:

- Presiden, yang mempunyai motif-motif dalam pemerintahan yang antara lain adalah kembali terpilih dalam pemilihan umum; pencapaian ideologi; dan evaluasi historis.

<sup>20</sup> Walter Lippman, 1991. *Public Opinion*. New Jersey: Transaction Publisher., 15.

<sup>21</sup> Brandice Canes-Wrone, 2006. *Who Leads Whom? President, Policy and Public Opinion*. Chicago: Chicago University Press, 20.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 21-23.



- Legislatif atau kongres, bisa dibagi dalam dua tipe. Pertama *pull incentives* yaitu mencoba secara persuasif publik untuk sejalan dengan mereka. Kedua, *assign electorates* yaitu legislatif atau kongres memperjuangkan suara pemilih. Kedua hal tersebut sangat bergantung kepada tingkat keutamaan dari isu.
- Pemilih/publik.

Dalam teori *public appeals* ini terdapat interaksi antara ketiga aktor tersebut di atas dalam proses perumusan kebijakan. Dalam interaksi tersebut yang menjadi subjek utama adalah presiden dalam hal ini sebagai penentu akhir dari keputusan. Presiden bisa mengubah preferensi kebijakan yang ada dalam masyarakat<sup>23</sup>. Hal ini disebabkan oleh lebih banyaknya informasi yang dimiliki oleh presiden atau disebut juga dengan “*cheap talk*”. Dalam “*cheap talk*” lebih mudah mengubah preferensi dari publik apabila terkait dengan isu luar negeri.

#### **I.4.III. Konsep Pemasaran Politik**

Konsep Pemasaran Politik merupakan penggunaan prinsip dan prosedur pemasaran dalam kampanye politik oleh individu atau organisasi<sup>24</sup>. Konsep Pemasaran Politik ini mempunyai beberapa tujuan yang antara lain adalah mengubah opini publik; memenangkan pemilihan umum; menyebarkan ideologi; melewati proses legislasi dan referendum. Peneliti menggunakan konsep ini berfokus kepada salah satu tujuan dari Pemasaran Politik yaitu mengubah opini

<sup>23</sup> Ibid., 31.

<sup>24</sup> Bruce I, Newman dan Richard M. Perloff, 2004. *Political Marketing: Theory, Research and Application* dalam Lynda Lee Kaid, 2004, *Handbook of Political Communication Research*. London: Lawrence Elbraum Associates Publishers, 18.

publik. Dalam kehidupan politik yang demokratis yang penting untuk diperhatikan dan dianalisa oleh seorang pemimpin adalah kondisi dari opini publik. Hal ini dikarenakan opini publik merupakan evaluator dari kinerja dari seorang pemimpin selama kepemimpinannya.

Dalam Konsep Pemasaran Politik, seorang pemimpin diibaratkan sebagai penjual dan opini publik adalah konsumen<sup>25</sup>. Oleh karena itulah penjual atau pemimpin harus memikirkan strategi dalam menjual produknya yaitu ide-ide serta tujuan dalam pemerintahan. Produk tersebut harus dipromosikan kepada konsumen atau opini publik agar mereka tahu dan mengerti sehingga mereka bisa menerima produk tersebut. Hal tersebut seperti yang disebutkan oleh *American Marketing Association* bahwa pemasaran adalah serangkaian proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan dan menawarkan sesuatu yang bernilai bagi pelanggan, klien, pasangan dan masyarakat<sup>26</sup>.

Sementara itu, definisi dari pemasaran politik adalah serangkaian aktivitas, proses oleh organisasi politik, kandidat atau individu untuk membuat, mengomunikasikan, menyampaikan dan menawarkan janji-janji yang bernilai dengan pemilih, partai politik dan *stakeholder* serta masyarakat<sup>27</sup>. Konsep ini merupakan hasil penggabungan dari dua studi yaitu ekonomi dan politik. Oleh karena itu, banyak digunakan istilah-istilah yang berhubungan dengan ekonomi

---

<sup>25</sup> Bruce I. Newman, n.d. *Political Marketing*. Chicago: De Paul University, 654.

<sup>26</sup> Andrew Hughesdan Stephen Dann, 2009. *Political Marketing and Stakeholder Engagement*. terdapat dalam <http://mtg.sagepub.com/content/9/2/243>, 244.

<sup>27</sup> Ibid.



dalam analisa nantinya. Media merupakan alat yang digunakan untuk memasarkan produk pemerintah atau politisi kepada publik.

Seorang pemimpin dalam usahanya untuk mengubah opini publik harus memikirkan strategi yakni menganalisa terlebih dahulu karakteristik publik. Dengan mengetahui dan memahami terlebih dahulu karakteristik yang ada di dalam opini publik maka strategi kemudian bisa disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **I.4.IV. “Crafted Talk”**

‘*Crafted Talk*’ adalah strategi yang digunakan oleh politisi atau presiden untuk mengantisipasi dan meyakinkan opini publik terhadap kebijakan yang menjadi pilihannya<sup>28</sup>. Strategi tersebut digunakan oleh presiden untuk mengubah preferensi opini publik dan menghindari resiko dari menetapkan kebijakan yang tidak menjadi preferensi dari publik. Strategi “*crafted talk*” diaplikasikan seorang presiden yang responsif terhadap preferensi dari opini publik dalam negeri. Sikap responsif tersebut ditunjukkan dengan penggunaan jajak pendapat opini publik untuk memetakan preferensi dari opini publik. Hal tersebut merupakan langkah pertama dari seorang presiden dalam aplikasi strategi “*crafted talk*”.

Presiden melakukan pemetaan mengenai preferensi kebijakan yang mendapatkan dukungan dari opini publik bukan untuk menuruti apa yang menjadi

---

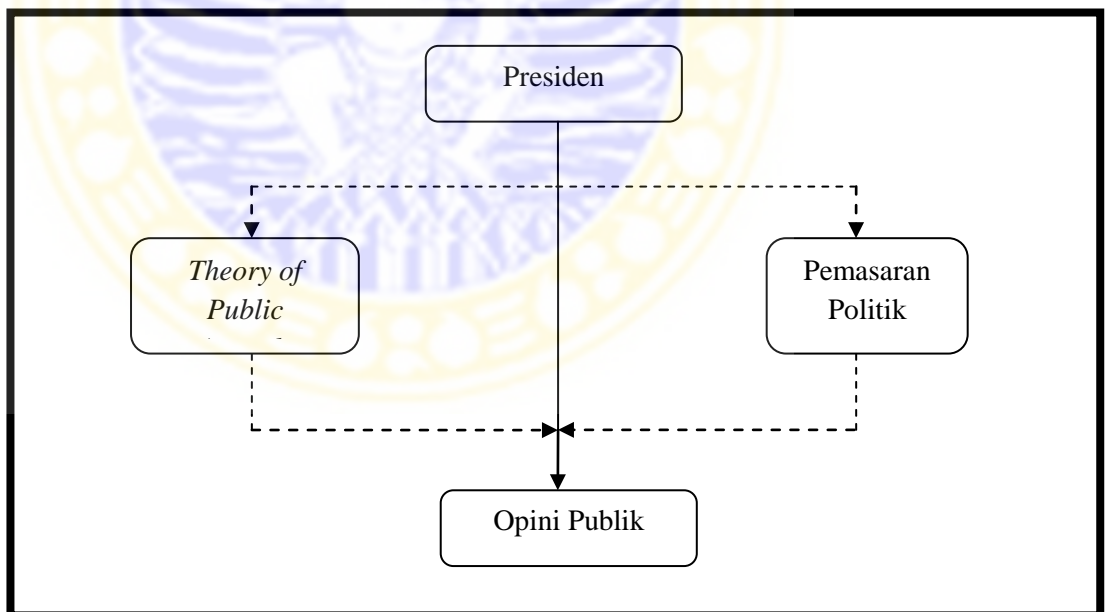
<sup>28</sup> R. L. Jacobs, & R. Y. Shaprio, 2000. *Politicians don't pander: Political manipulation and the loss of democratic responsiveness*. Chicago: University of Chicago Press, terdapat dalam Brandon Rottinghaus, 2008, *Presidential Leadership on Foreign Policy, Opinion Polling and the Possible Limits of “Crafted Talk”*, *Political Communication*, 25: 138-157, Taylor and Francis Group, 139.

preferensi opini publik. Karena bukan opini publik yang menentukan arah kebijakan, tetapi opini publik hanya mempunyai argumen terhadap kebijakan<sup>29</sup>. Faktor lain yang membuat presiden mengaplikasikan strategi adalah kemampuan dari opini publik untuk menekan presiden. Tetapi, opini publik bukan penentu dari arah kebijakan. Oleh karena itu, presiden mengaplikasikan strategi “*crafted talk*” untuk mengurangi tekanan dari opini publik.

### I.5. Sintesis Kerangka Pemikiran

Dari konsep dan teori tersebut di atas dalam mendukung hipotesis dan sebagai alat analisa bisa dijadikan sintesis kerangka berpikir sebagai berikut:

**Tabel I.2. Sintesis Kerangka Pemikiran**



Presiden mempunyai kekuatan untuk memengaruhi atau mengubah preferensi dari opini publik. Dua strategi bisa dilakukan presiden untuk memengaruhi atau mengubah preferensi opini publik. Pertama adalah

<sup>29</sup> Ibid.

presiden menggunakan *theory of public appeals*. Kedua adalah presiden menggunakan pemasaran politik.

## **I.6. Hipotesis**

Berdasarkan kepada kerangka pemikiran yang peneliti gunakan, hipotesis dari rumusan masalah adalah: strategi Nicolas Sarkozy dalam mendapatkan dukungan opini publik terkait kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO menggunakan dua strategi. Strategi pertama adalah “*Public Appeals*” yaitu mengeluarkan kebijakan pertahanan dan keamanan lain. Kebijakan tersebut adalah kebijakan memperkuat EU CSDP. Kedua, konsep pemasaran politik yaitu pemerintahan Prancis di bawah Nicolas Sarkozy mengomunikasikan tujuan dalam kebijakan reintegrasi dalam NATO melalui media. Dua strategi yang bersifat persuasif tersebut diaplikasikan dengan tujuan meyakinkan opini publik terkait kebijakannya reintegrasi Prancis ke dalam NATO.

## **I.7. Metodologi Penelitian**

### **I.7.I. Definisi Konseptual**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang kemudian perlu untuk dikonseptualisasikan. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu dikonseptualisasikan:

### **I.7.I.1.Opini Publik**

Opini publik merupakan salah satu variabel penting dalam lingkungan domestik dari negara demokratis<sup>30</sup>. Opini publik mempunyai peran dan pengaruh dalam pembuatan keputusan atau kebijakan. Hal ini dikarenakan publik tidak mengetahui bagaimana kebijakan tersebut dibuat dan situasi dan kondisi apa yang sedang dihadapi secara keseluruhan. Opini publik sering kali kekurangan informasi akan suatu permasalahan yang membuat pengaruh mereka menjadi kecil dalam pembuatan suatu kebijakan terutama kebijakan luar negeri. Karakteristik dari opini publik adalah reaktif terhadap suatu isu yang sedang berkembang. Opini publik sering kali dijadikan objek bagi birokrasi yang di dalamnya terdapat presiden serta aktor lain yang ingin menyebarkan pengaruh mereka.

Opini publik juga didefinisikan sebagai perilaku, perspektif dan preferensi dari masyarakat terhadap kejadian, fenomena dan isu yang bersifat mutualisme<sup>31</sup>. Jadi opini publik muncul karena adanya interaksi mutual antara masyarakat dengan pemerintah. Pengaruh dari opini publik dalam perumusan kebijakan kemudian bergantung kepada tingkat sensitivitas dari isu yang diangkat<sup>32</sup>. Karena seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa terdapat interaksi mutual antara publik dengan pemerintah.

---

<sup>30</sup> Graham Evans dan Jeffrey Newnham, 1998. *Dictionary of International Relations*. London: Penguin Group. 455.

<sup>31</sup> John E. Mueller. "Public Opinion." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008.

<sup>32</sup> Ole R. Holsti, 2004. *Public Opinion and American Foreign Policy*. University of Michigan Press.

### **I.7.I.2. Public Appeals**

*Public Appeal* dalam penelitian ini dikonseptualisasikan sebagai kekuatan atau kemampuan untuk menarik, membuat senang, atau menstimulasi pikiran atau emosi dari publik<sup>33</sup>. *Public appeals* menjelaskan hubungan diantara dua variabel dalam penelitian ini yaitu presiden dan opini publik. Terminologi tersebut menggambarkan hubungan satu arah antara presiden dan opini publik. Presiden mempunyai kemampuan atau kekuatan untuk menstimulasi pikiran dan emosi dari publik mengenai suatu isu, peristiwa atau kebijakan tertentu.

### **I.7.I.3. Komunikasi**

Komunikasi dalam penelitian ini dikonseptualisasikan sebagai proses pembicaraan, pidato, simbol dan aksi mengandung informasi yang disampaikan dari satu pihak ke pihak lain<sup>34</sup>. Pengertian lain dari komunikasi adalah segala bentuk tindakan dari satu orang yang memberi atau menerima informasi dari orang lain mengenai kebutuhan, keinginan, persepsi, pengetahuan, atau pernyataan afeksi<sup>35</sup>. Komunikasi secara ideal terdapat dua pihak yang saling mengerti informasi yang disampaikan dari satu pihak ke pihak lain dan sebaliknya. Dua pihak tersebut adalah pengirim dan penerima pesan atau komunikator dan komunikan.

<sup>33</sup>“*Appeal*”. (n.d.). *Easton's 1897 Bible Dictionary*. May 22, 2012, dari Dictionary.com website: <http://dictionary.reference.com/browse/appeal>, diakses pada 23 Mei 2012.

<sup>34</sup> “*A Closer Look: Definition of Communication*”. (n.d.). 20 Mei 2012, terdapat dalam <http://reference.yourdictionary.com/word-definitions/definition-of-communication.html>, diakses pada 23 Mei 2012.

<sup>35</sup> Julia Valenzuela. “*Communication*”. 30 Juli 2002. Terdapat dalam <http://www.unm.edu/~devalenz/handouts/defcomm.html>, [23 Mei 2012].



## **I.7.II. Definisi Operasional**

Dari konseptualisasi tersebut di atas kemudian istilah-istilah tersebut bisa dioperasionalkan sebagai berikut:

### **I.7.II.1. Opini publik**

Opini publik dalam penelitian ini dioperasionalkan dengan menggunakan indikator prosentase jajak pendapat atau *polling* publik Prancis mengenai isu dan permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO. Opini publik dikatakan berada pada tingkat yang tinggi apabila prosentase jajak pendapat atau *polling* berada pada angka di atas 50% pada salah satu pilihan dalam jajak pendapat atau *polling* opini publik.

### **I.7.II.2. Public Appeals**

*Public appeals* dalam penelitian ini dioperasionalkan dengan menggunakan indikator data-data kebijakan yang dikeluarkan oleh Nicolas Sarkozy. *Public appeals* dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa Nicolas Sarkozy mengeluarkan kebijakan lain untuk mendukung kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO yang mendapat penolakan dari opini publik.

### **I.7.II.3. Komunikasi**

Komunikasi dalam penelitian ini dioperasionalkan dengan menggunakan indikator media massa. Komunikasi dibuktikan dengan media massa yang memuat "*publicity statement*" yang berisi justifikasi dan alasan Nicolas Sarkozy menetapkan kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO.

### **I.7.III. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif karena menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena diantara beberapa variabel. Variabel yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah strategi Nicolas Sarkozy dalam mendapatkan dukungan terkait kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO. Kemudian variabel yang menjelaskan adalah opini publik Prancis dan strategi persuasif. Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan secara deskriptif hubungan antara variabel-variabel tersebut di atas.

### **I.7.IV. Jangkauan Penelitian**

Batasan atau jangkauan dari penelitian ini adalah dari 2007 sampai dengan tahun 2011. Peneliti tidak menutup kemungkinan menggunakan data-data di luar jangkauan untuk mendukung penelitian. Data-data yang akan digunakan adalah meliputi dinamika dari kebijakan keamanan dan pertahanan Prancis. Data lebih khusus berhubungan dengan pemerintahan Prancis pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy yang menetapkan kebijakan reintegrasi dalam NATO.

### **I.7.V. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Tipe data dalam penelitian ini meliputi data-data sekunder yang kemudian dianalisa dan diperoleh dari berbagai media seperti buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan bahan-bahan lainnya dari internet.



### **I.7.VI. Teknis Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang berupa informasi atau uraian dalam bentuk bahasa prosa atau kalimat kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.

### **I.7.VII. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan pembagian sebagai berikut, BAB I pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesis kerangka pemikiran, hipotesis, dan metodologi.

BAB II membahas mengenai opini publik Prancis terhadap kebijakan reintegrasi Prancis ke dalam NATO. Secara umum, bab ini juga membahas mengenai opini publik terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan dari Prancis berikut analisisnya berdasarkan kepada kerangka pemikiran.

BAB III membahas mengenai kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO pada pemerintahan Nicolas Sarkozy. Dalam bab ini juga dibahas mengenai kebijakan pertahanan dan keamanan serta strategi yang dilakukan oleh pemerintahan Sarkozy. Hal tersebut dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan memperkuat EU CSDP. Hal tersebut kemudian juga dianalisa berdasar kepada kerangka pemikiran yang sudah disusun.

BAB IV membahas mengenai komunikasi politik dan cara Nicolas Sarkozy dalam menyampaikan kebijakan pertahanan dan keamanan Prancis kepada publik. Hal tersebut merupakan strategi dari pemerintahan Nicolas Sarkozy dalam meyakinkan opini publik. Media menjadi salah satu yang dibahas dalam bab ini. Bab ini disertai dengan analisis berdasar kepada kerangka pemikiran.

BAB V adalah kesimpulan yang mencoba untuk merangkum secara singkat strategi dan cara dari Nicolas Sarkozy dalam meyakinkan opini publik Prancis terhadap kebijakan reintegrasi Prancis ke dalam NATO.



## BAB II

### OPINI PUBLIK PRANCIS TERHADAP KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN PRANCIS

Bab ini membahas mengenai penilaian opini publik Prancis terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan Prancis pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy. Bab ini menyajikan dan menganalisa data mengenai kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO dan kebijakan memperkuat CSDP serta *polling* atau jajak pendapat tentang dua kebijakan tersebut. Bab ini juga memaparkan tentang karakteristik dari opini publik Prancis yang terbentuk dari sejarah negara tersebut.

Opini publik merupakan subjek dalam sosiologi politik yang mempunyai karakteristik tidak rasional, emosional, tidak memiliki orientasi yang jelas, dan tidak mempunyai informasi<sup>1</sup>. Oleh karena itu, bab ini menjelaskan volatilitas opini publik Prancis terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan Prancis.

#### II.1. Karakteristik Opini Publik Prancis

Opini publik Prancis mempunyai nasionalisme yang tinggi dan menjunjung tinggi independensi negaranya. Terdapat dua faktor yang menyebabkan karakter tersebut yaitu Anti Amerikanisme dan Gaullisme. Penjelasan dari dua faktor tersebut adalah sebagai berikut.

---

<sup>1</sup> Ole R. Holsti, 2004. *Public Opinion and American Foreign Policy*. University of Michigan Press, 7-8.

### II.1.I. Anti Amerikanisme di Prancis

Anti-Amerikanisme adalah segala tindakan, sikap dan pemikiran yang negatif mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan AS atau stereotipe terhadap AS meliputi unsur dan karakteristik dari AS<sup>2</sup>. Sikap Anti Amerikanisme ini memang banyak berkembang dalam opini publik di negara-negara Eropa. Tetapi, yang paling digambarkan dengan tingkat Anti Amerikanisme yang tinggi adalah opini publik di Prancis. Anti-Amerikanisme yang berkembang di Prancis berawal dari sejarah yang panjang. Hal tersebut dimulai pada abad ke-18 setelah Revolusi Prancis tahun 1789<sup>3</sup>.

Terdapat setidaknya empat kejadian yang membentuk sikap Anti Amerikanisme dalam opini publik Prancis<sup>4</sup>. Empat kejadian tersebut adalah pertama pada saat Revolusi Prancis terjadi. Tindakan diam yang dilakukan oleh AS ternyata membawa masalah di kemudian hari bagi hubungan diantara kedua negara tersebut. AS yang waktu itu dianggap sebagai negara yang demokratis tidak melakukan tindakan apapun untuk mendukung pemberontakan yang dilakukan rakyat Prancis untuk mendapatkan keadilan dan kebebasan dengan menggulingkan Raja Louis XIV. Kedua adalah isolasionisme yang dilakukan Amerika Serikat pasca Perang Dunia I diinterpretasikan oleh publik Prancis sebagai tindakan yang apatis terhadap kondisi politik yang bergejolak pada waktu itu. Ketiga adalah pada periode Perang Dingin. Pada periode tersebut ada rasa

---

<sup>2</sup> Susan Foxworthy. 2009. Charles de Gaulle's Influence On Contemporary France Culture On. Butler University, h. 2.

<sup>3</sup> Denis Lacorne, 2005. *Anti-Americanism and Americanophobia: A French Perspective*. s.l., 1.

<sup>4</sup> Meunier, Op. Cit., 1-2.

terancam dari Prancis akan penetrasi dari kebudayaan AS yang pelan-pelan masuk dalam masyarakat Prancis. Karena mulai dirasakan adanya penurunan tingkat budaya lokal atau terjadi asimilasi budaya dari kebudayaan AS. Keempat adalah Perang Vietnam. Perang tersebut semakin memperburuk citra dari AS yang dianggap oleh publik Prancis sebagai suatu negara yang imperialistik.

Periode 1990-an merupakan masa Anti Amerikanisme mencapai puncak di Prancis. Anti Amerikanisme yang ada di Prancis pada periode waktu tersebut bisa disebut juga dengan Anti Hegemoni AS<sup>5</sup>. Setelah Perang Dingin berakhir, AS merupakan negara adidaya yang tersisa. AS secara otomatis menjadi hegemon dalam politik internasional setelah runtuhnya Uni Soviet. Terdapat lima faktor yang membawa Anti Amerikanisme di Prancis mencapai puncak pada periode 1990-an. Lima faktor tersebut adalah *Euromissiles* pada tahun 1980-an yakni persengkataan dalam perjanjian proliferasi nuklir sebagai senjata; kebijakan AS terhadap permasalahan di Timur Tengah contohnya invasi Irak dan dukungan AS terhadap Israel; globalisasi yang tanpa aturan; unilateralisme AS; hegemoni AS<sup>6</sup>.

Kebijakan AS di Timur Tengah yang antara lain adalah dukungan AS kepada Israel atas konflik Israel-Palestina juga merupakan indikator bagi Anti Amerikanisme di Prancis. Opini publik Prancis sebagian besar adalah muslim

---

<sup>5</sup> Hubert Vedrine. 2004. *On Anti Americanism*. terdapat dalam *Anti Americanism*. The Brown Journal of World Affairs Vol. X, Issue 2., h. 117.

<sup>6</sup> Sophie Meunier. 2005. *The Distinctiveness of French Anti Americanism*. Princeton University, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs., h. 2-3.



pendatang dari Afrika Utara<sup>7</sup>. Invasi Irak oleh Amerika Serikat pada tahun 2003 semakin memperburuk citra AS.

Kejadian-kejadian tersebut di atas kemudian ditambah dengan publikasi dari media massa membuat muncul rasa penolakan publik Prancis terhadap sesuatu yang berhubungan dengan AS. Dalam jajak pendapat yang dilakukan terhadap publik Prancis pada tahun 2000-2003 diketahui bahwa 56% menyatakan pandangan yang negatif mengenai AS<sup>8</sup>. Deskripsi lebih lanjut dari *polling* tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel II.1. Jajak Pendapat Opini Publik Prancis terhadap AS**

Ketika Anda sedang memikirkan AS, apa pencitraan yang muncul mengenai negara tersebut?

“Saya tidak suka AS”	2%
<b>Kekerasan</b>	<b>21%</b>
Kekerasan	14%
Kriminal dan obat terlarang	7%
Hukuman mati	2%
Perdagangan bebas senjata	2%
<b>Sifat psikologis negatif</b>	<b>14%</b>
“mereka berlebihan pada semua hal”	3%
Arogan	2%
Individualisme	2%
Ekstremisme	1%

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Denis Lacorne. 2005. *Anti-Americanism and Americanophobia: A French Perspective*. s.l., 2.

Puritanisme	1%
Kegilaan/"orang gila"	1%
Egois	1%
Intoleran	1%
<b>Kritik terhadap pengaruh AS</b>	<b>11%</b>
Mereka mengontrol negara lain	9%
"mereka pikir dirinya polisi dunia"	2%
"mereka ingin memaksakan gaya hidup mereka"	2%
<b>Ekonomi</b>	<b>7%</b>
"imperialisme AS"	3%
Hegemoni ekonomi	2%
Kapitalisme	2%
<b>Makanan</b>	<b>3%</b>
Makanan tak berkualitas	2%
Kegemukan orang AS	1%
<b>Aspek negatif lain</b>	<b>2%</b>
<b>Total penilaian negatif</b>	<b>56%</b>

Sumber diolah dari "*France-Etats-Unis: regards croisés*", SOFRES/French American Foundation poll, Mei 2000, dalam Denis Lacorne. 2005. *Anti-Americanism and Americanophobia: A French Perspective*.

Anti Amerikanisme yang berkembang di Prancis memang mengalami volatilitas yang tinggi. Hal ini dikarenakan perubahan isu yang silih berganti dibawakan oleh media. Hal tersebut tergambar pada opini publik Prancis antara kurun waktu 2000-2004. Pada tahun 2001, ketika terjadi serangan teror 9/11, terdapat simpati mendalam dari opini publik Prancis terhadap AS. Pada tahun 2003, ketika AS melakukan invasi terhadap Irak, kondisi opini publik Prancis



berubah menjadi antipati yaitu 78% opini publik Prancis menentang invasi tersebut<sup>9</sup>.

Anti Amerikanisme yang ada di Prancis sudah lama ada dan mengalami perubahan yang fluktuatif. Informasi dan isu yang berkembang mengenai hubungan diantara Prancis dengan AS menjadi penyebab fluktuasi tersebut.

### **II.1.II. Gaullisme dalam Opini Publik Prancis**

Charles de Gaulle yang merupakan tokoh revolusi Prancis dari Republik IV ke Republik ke-V masih mempunyai pengaruh terhadap pemikiran publik Prancis sampai dengan sekarang ini. Charles de Gaulle terkenal dengan sikap nasionalis dalam setiap kebijakan yang ditetapkannya. Republik V yang menjadi sistem pemerintahan Prancis sekarang ini menempatkan seorang presiden seperti layaknya raja dalam sistem monarki<sup>10</sup>. Hal tersebut membuat presiden mempunyai banyak hak atas kebijakan luar negeri. Charles de Gaulle adalah presiden yang mempunyai kharisma yang kuat. Kekuatan diri Charles de Gaulle tersebut menginspirasi publik Prancis sampai dengan sekarang ini.

Sekarang ini, Charles de Gaulle masih menjadi representatif dari Prancis dibandingkan dengan presiden Prancis lain pada masa Republik V. Jejak pendapat tahun 2008 menunjukkan kebenaran atas argumen tersebut. Jejak pendapat menunjukkan bahwa 88% opini publik Prancis menganggap bahwa Charles de

---

<sup>9</sup> Ibid. 3-4.

<sup>10</sup> Hugh Schofield. 2012. *Nicolas Sarkozy: Why is the French President is so Dislike?*. Online. terdapat dalam <http://m.bbc.co.uk/news/magazine-17775249>, diakses pada [26 April 2012].

Gaulle adalah representasi baiknya citra Prancis secara internasional<sup>11</sup>. Sementara itu, presiden Prancis sekarang ini, Nicolas Sarkozy, menempati posisi terakhir pada jejak pendapat mengenai presiden Prancis paling berpengaruh. Berikut ini adalah tabelnya:

**Tabel II.2. Jajak Pendapat Penilaian Opini Publik Prancis terhadap Presiden-presiden Prancis**

Dari masing-masing presiden Prancis di bawah, manakah yang merepresentasikan Prancis baik atau buruk?

Presiden	Baik	Buruk	Tidak Yakin
Charles de Gaulle	88%	5%	7%
François Mitterrand	74%	23%	3%
Georges Pompidou	69%	14%	17%
Jacques Chirac	66%	30%	4%
Valéry Giscard d'Estaing	56%	36%	8%
Nicolas Sarkozy	40%	53%	7%

Sumber diolah dari Angus Reid Global Monitor. 2008. '*de Gaulle Best, Sarkozy Worst for French*'. terdapat dalam [http://www.angus-reid.com/polls/31767/de\\_gaulle\\_best\\_sarkozy\\_worst\\_for\\_french/](http://www.angus-reid.com/polls/31767/de_gaulle_best_sarkozy_worst_for_french/), diakses pada [26 April 2012].

Charles de Gaulle dari dekade ke dekade selalu mendapatkan kesan yang baik dari opini publik Prancis. Hal tersebut terbukti setelah 20 tahun mundurnya Charles de Gaulle sebagai presiden, kebijakan yang ditetapkannya masih menjadi pedoman bagi presiden lain. Jajak pendapat opini publik tahun 1990 menyebutkan

<sup>11</sup> Angus Reid Global Monitor, 2008, '*de Gaulle Best, Sarkozy Worst for French*'. terdapat dalam [http://www.angus-reid.com/polls/31767/de\\_gaulle\\_best\\_sarkozy\\_worst\\_for\\_french/](http://www.angus-reid.com/polls/31767/de_gaulle_best_sarkozy_worst_for_french/), diakses pada [26 April 2012].

bahwa 82% mendukung kebijakan-kebijakan Charles de Gaulle<sup>12</sup>. Ketika TNS-SOFRES kembali memberikan pertanyaan kepada opini publik Prancis tentang arah kebijakan dari Charles de Gaulle banyak jawaban yang muncul<sup>13</sup>. Berikut adalah hasil dari jajak pendapat tersebut:

**Tabel II.3. Jajak Pendapat Opini Publik terhadap Kebijakan Charles de Gaulle**

“Apa tujuan utama Charles de Gaulle dalam kebijakan luar negerinya?”

Tujuan	Prosentase
Kejayaan dan kebesaran Prancis	53%
Independensi nasional	42%
Tercapainya perdamaian	32%
Gerakan non blok	26%
Konstruksi Eropa	22%

Sumber diolah dari TNS SOFRES, n.d., dalam Ioano Panagoret, 2010. *European Policy of General Charles de Gaulle in the French Public Opinion*. University of Targoviste., 332.

Banyak hal membuat Charles de Gaulle menjadi presiden yang mendapatkan tempat di hati sebagian besar rakyatnya sampai dengan sekarang ini. Pada masa pemerintahannya, Charles de Gaulle dikenal sebagai presiden yang nasionalis sekaligus *europeanist*<sup>14</sup>. Charles de Gaulle dalam menetapkan kebijakannya selalu

<sup>12</sup> Ioano Panagoret, 2010. *European Policy of General Charles de Gaulle in the French Public Opinion*. University of Targoviste., 333.

<sup>13</sup> “*Qui Sommes-Nous?*”. 2012. Terdapat dalam <http://www.tns-sofres.com/qui-sommes-nous/>, diakses pada [26 Mei 2012], TNS-SOFRES adalah lembaga yang menyediakan referensi pemasaran dan penelitian opini publik di Prancis, TNS SOFRES adalah perusahaan dari TNS yaitu perusahaan yang mempelajari mengenai pemasaran di dunia.

<sup>14</sup> Panagoret, Op.Cit., 330.

mengutamakan kepentingan domestik dari negaranya. Pada masa pemerintahannya isu yang sedang berkembang adalah Perang Dingin. Pada masa Perang Dingin tersebut Prancis berdiri secara independen dengan tidak membela salah satu dari blok yang bertikai dalam Perang Dingin. Salah satu keberhasilan lain dari kebijakan Charles de Gaulle adalah independensi nuklir yang dijaga sampai dengan sekarang ini. Charles de Gaulle juga melakukan revolusi ekonomi dengan mengevaluasi kinerja dari mata uang Prancis, *franc*<sup>15</sup>.

Dalam ruang lingkup Eropa, Charles de Gaulle menjalin kerjasama terutama di bidang perdagangan dan ekonomi dengan negara-negara Eropa lainnya, terutama Jerman. Kerjasama tersebut bertujuan untuk menciptakan komunitas Eropa<sup>16</sup>. Hal tersebut menjadi inspirasi bagi banyak pihak terutama publik Prancis. Ide *europianist* yang dikeluarkan dari pemikiran dan kebijakan Charles de Gaulle adalah awal dari terbentuknya Uni Eropa<sup>17</sup>. Organisasi kolektif negara-negara Eropa berawal dari kegiatan ekonomi antara Prancis dengan Jerman yaitu *European Coal and Steel Cooperation* (ECSC). Charles de Gaulle memiliki kontribusi yang besar terhadap perkembangan Prancis dan Eropa. Kebijakan yang ditetapkan Charles de Gaulle memang *europianist* dan hal tersebut didukung oleh opini publik yang ada pada waktu itu. Berikut adalah hasil jajak pendapat opini publik Prancis mengenai independensi dari Eropa:

<sup>15</sup> “Charles de Gaulle: A Life of Political Influence”. 2010. Terdapat dalam <http://www.france24.com/en/20101109-charles-de-gaulle-life-political-influence-timeline-france>, diakses pada [26 April 2012].

<sup>16</sup> Ioano Panagoret, 2010. *European Policy of General Charles de Gaulle in the French Public Opinion*. University of Targoviste., 333

**Tabel II.4. Jajak Pendapat Opini Publik Prancis mengenai Independensi Prancis**

<b>Bulan dan Tahun</b>	<b>Eropa yang independen</b>	<b>Eropa Atlanticist</b>
Maret 1963	46%	26%
Pebruari 1964	41%	20%
Juni 1965	39%	22%
Mei 1967	49%	23%
Desember 1969	51%	22%

Sumber diolah dari Ioano Panagoret, 2010. *European Policy of General Charles de Gaulle in the French Public Opinion*. University of Targoviste., 334

Opini publik mempercayai bahwa kebijakan *europeanist* yang dijalankan oleh Charles de Gaulle bertujuan untuk mencapai kepentingan-kepentingan nasional Prancis. Negara tersebut pernah menjadi negara yang berpengaruh di Eropa. Setelah Perang Dunia II berakhir, pengaruh Prancis di Eropa berkurang. Peran tersebut digantikan oleh AS yang masuk ke Eropa dengan berbagai bantuan yang ditawarkan kepada negara-negara Eropa. Hal tersebut merupakan faktor *europeanist* yang ada pada diri Charles de Gaulle.

Charles de Gaulle disebut sebagai pemimpin Prancis yang paling berpengaruh dan juga sebagai pemimpin sikap Anti Amerika yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan keluarnya Prancis dari NATO tahun 1966 dan kritik Charles de Gaulle terhadap AS mengenai Perang Vietnam yang disampaikan pada saat di Kamboja. Pada dasarnya, Charles de Gaulle hanya tidak patuh dengan



AS<sup>18</sup>. Sikap bersahabat terhadap AS ditunjukkan Charles de Gaulle ketika ia datang ke pemakaman John F. Kennedy.

Opini publik Prancis sampai dengan sekarang ini mendapatkan pengaruh dari Charles de Gaulle. Pemikiran Gaullisme berdasarkan kepada independensi nasional dan integrasi Eropa yang independen. Sikap tidak patuh Charles de Gaulle terhadap AS juga memengaruhi opini publik Prancis. Hal tersebut terbukti pada Anti Amerikanisme yang ada di Prancis. Tabel peringkat presiden Republik V Prancis di atas menunjukkan bahwa presiden Prancis sekarang ini kurang mendapatkan dukungan dari opini publik. Hal tersebut tak lain disebabkan oleh lunturnya Gaullisme dalam kebijakan luar negeri Nicolas Sarkozy. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah reintegrasi dalam NATO.

## **II.2. Opini Publik Prancis terhadap Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Nicolas Sarkozy**

Dua kebijakan pertahanan dan keamanan Prancis pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy mendapatkan banyak perhatian dari publik Prancis. Revolusi kebijakan pertahanan dan keamanan dilakukan Nicolas Sarkozy dengan melakukan reintegrasi ke dalam NATO. Faktor tersebut membuat kebijakan pertahanan dan keamanan Prancis mendapatkan perhatian yang besar dari publik. Perbedaan dan perubahan opini publik Prancis terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan serta unsur di dalamnya lebih lanjut dijelaskan di bawah ini.

<sup>18</sup> Nathanael Greene, 2010, *Charles de Gaulle Legacy: He Was Not Subservient to America*. Terdapat dalam <http://www.france24.com/en/20101109-charles-de-gaulle-legacy-france-usa-international-not-subservient>, diakses pada [26 April 2012].

## II.2.I. Opini Publik Prancis terhadap Kebijakan Reintegrasi dalam NATO

Nicolas Sarkozy menyampaikan rencana reintegrasi ke dalam NATO pada Agustus 2007 kepada jajaran duta besar Prancis<sup>19</sup>. Kemudian secara bertahap melalui proses komunikasi politik, proposal mendapatkan persetujuan dari Majelis Nasional Prancis. Kebijakan reintegrasi dalam NATO secara resmi ditetapkan pada 3-4 April 2009. Pada tahun 2009, opini publik yang mendukung kebijakan tersebut berada pada kisaran 52%<sup>20</sup>. Opini publik yang mendukung kebijakan reintegrasi dalam NATO 70% diantaranya adalah usia antara 17-25 tahun<sup>21</sup>.

Fakta tersebut berbeda dengan jajak pendapat opini publik Prancis terhadap AS dan Operasi Militer NATO Afghanistan pada tahun-tahun sebelumnya, sebagai berikut

**Tabel II.5. Opini Publik Prancis terhadap AS**

“Apakah anda memandang AS sebagai negara yang baik atau tidak?”

Tahun	Prosentase	
	Menilai baik	Menilai buruk
2006	39%	60%
2007	39%	60%
2008	42%	57%
2009	75%	25%

<sup>19</sup> Gisela M.R. Bacquet, 2009. *France's New NATO Policy: Leveraging a Realignment of the Alliance*. Dalam “The Foreign Policy of USA: President Obama's New Course and the Future of Transatlantic Relations., 8.

<sup>20</sup> Lucy Gill. 2009. *French Split Over Rejoining NATO*. Terdapat dalam <http://news.bbc.co.uk/2/hi/7937126.stm>, diakses pada [29 April 2012].

<sup>21</sup> Ibid.

Sumber diolah dari Pew Research Center. 2010. *Pew Global Attitudes Project: Opinion of The United States 2006-2009*. Terdapat dalam <http://www.pewglobal.org/database/?indicator=1&survey=10&response=Favorable&mode=chart>, diakses pada [27 Mei 2012].

**Tabel II.6. Opini Publik Prancis terhadap Operasi Militer NATO di**

**Afghanistan**

Haruskah AS dan NATO mempertahankan atau menarik militernya di Afghanistan?

Tahun	Prosentase	
	Mempertahankan	Menarik
2007	48%	51%
2008	46%	54%
2009	50%	49%

Sumber diolah dari Pew Research Center. 2010. *Pew Global Attitudes Project: Support for War in Afghanistan 2007-2009*. Terdapat dalam <http://www.pewglobal.org/database/?indicator=9&survey=10&response=Keep%20troops%20in%20Afghanistan&mode=chart>, diakses pada [27 Mei 2012].

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa opini publik Prancis pada tahun sebelumnya kurang mendukung NATO dalam operasi militernya maupun AS secara umum. Opini publik Prancis yang mengizinkan Nicolas Sarkozy untuk bergabung kembali ke dalam NATO pada tahun 2009 menunjukkan mengambangnya opini publik.

Pada tahun 1970-an opini publik terhadap NATO buruk. Hal tersebut dikarenakan adanya penilaian mengenai AS sebagai negara yang imperialis dan militeris<sup>22</sup>. Penilaian publik yang buruk terhadap AS tersebut direpresentasikan dengan keberadaan NATO. NATO yang menjadi bentuk keberadaan pengaruh AS di Eropa memang menjadi musuh bagi publik Prancis. Ide-ide *europanist* dari Charles de Gaulle sudah memengaruhi cara pandang opini publik Prancis. Hal tersebut berlangsung cukup lama yakni sampai dengan tahun 1990.

AS yang direpresentasikan oleh NATO digambarkan mempunyai sifat yang agresif. AS mencapai universalismenya dengan memaksakan demokrasi yang menggunakan militer dan salah satunya adalah NATO<sup>23</sup>. Invasi Irak pada tahun 2003 merupakan bukti dari penilaian opini publik Prancis tersebut. Sebagian besar penduduk Prancis tidak mendukung kebijakan tersebut. Invasi Irak merupakan contoh dari sikap agresif dari AS dalam memaksakan demokrasi.

Opini publik Prancis terhadap AS juga ikut menurun dalam kurun waktu 2002 sampai dengan dengan 2008. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2008 tingkat penilaian baik opini publik Prancis terhadap AS sebesar 42% dibandingkan dengan tahun 2002 sebesar 62%.<sup>24</sup>. Kemudian pada tahun 2009, terjadi perubahan penilaian opini publik Prancis terhadap AS. Opini publik

---

<sup>22</sup> Irwin M. Hall, n.d. *The French-American War Over Iraq*. New York University: Center for European Studies., 124.

<sup>23</sup> Ibid., 126.

<sup>24</sup> Pew Research Center. 2010. *Pew Global Attitudes: Opinions of The United States 2008*. Online. terdapat dalam <http://www.pewglobal.org/database/?indicator=1&survey=9&response=Favorable&mode=chart>, diakses pada [2 Mei 2012].

Prancis menilai baik AS dengan prosentase 75%<sup>25</sup>. Penilaian baik opini publik Prancis terhadap NATO juga meningkat pada tahun 2009 yakni 52%<sup>26</sup>. Pada tahun-tahun berikutnya dukungan opini publik terhadap NATO meningkat:

**Tabel II.7. Jajak Pendapat terhadap NATO**

Apakah Anda mendukung atau tidak mendukung terhadap NATO?

Tahun	Prosentase	
	Mendukung	Tidak
2010	68%	31%
2011	70%	30%

Sumber: Pew Research Center. 2011. *Pew Global Attitudes: Opinions of NATO 2010-2011*. Terdapat dalam <http://www.pewglobal.org/database/?indicator=37&survey=13&response=Favorable&mode=chart>, diakses pada [2 Mei 2012].

Data di atas menunjukkan bahwa masa pemerintahan Nicolas Sarkozy terjadi perubahan penilaian publik Prancis terhadap NATO maupun AS. Perubahan penilaian publik tersebut tidak terjadi begitu saja. Opini publik merupakan subjek sosiologi politik yang mengambang. Banyak faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi. Kebijakan reintegrasi dalam NATO yang ditetapkan oleh Nicolas Sarkozy mendapatkan dukungan dari opini publik

<sup>25</sup> Pew Research Center. 2010. *Pew Global Attitudes: Opinions of The United States 2009*. Online, terdapat dalam <http://www.pewglobal.org/database/?indicator=1&survey=9&response=Favorable&mode=chart>, diakses pada [2 Mei 2012].

<sup>26</sup> Lucy Gill. 2009. *French Split Over Rejoining NATO*. Terdapat dalam <http://news.bbc.co.uk/2/hi/7937126.stm>, diakses pada [29 April 2012].



Prancis. Hal tersebut tak lain karena adanya perubahan opini publik Prancis terhadap NATO maupun AS.

Sikap permisif dari opini publik Prancis terhadap kebijakan reintegrasi ke dalam NATO oleh Nicolas Sarkozy juga berlaku pada operasi yang dilakukan oleh NATO. Salah satu operasi NATO yang diikuti oleh Prancis adalah operasi militer di Afghanistan. Operasi militer NATO di Afghanistan disebut dengan ISAF (*International Security Assistance Force*). Tugas dari ISAF di Afghanistan adalah membantu pemerintah Afghanistan dalam memerangi insurgensi Taliban serta menjaga kestabilan pertumbuhan sosial dan ekonomi di Afghanistan<sup>27</sup>. Opini publik Prancis yang mendukung operasi militer ISAF mencapai 50%<sup>28</sup>.

Opini publik Prancis pada tahun berikutnya semakin menurun dukungannya terhadap keberadaan dari NATO di Afghanistan. Pada tahun 2011, dukungan opini publik terhadap ISAF menurun menjadi 41%<sup>29</sup>. Kondisi tersebut kemudian diperburuk dengan tewasnya empat tentara Prancis di Afghanistan pada 20 Januari 2012<sup>30</sup>. Survei lain yang dilakukan pada tahun 2011 bahkan menunjukkan bahwa

<sup>27</sup> "About ISAF". 2012. Terdapat dalam <http://www.isaf.nato.int/mission.html>, diakses pada [2 Mei 2012].

<sup>28</sup> Auxier, Richard C.. 2009. *Few in NATO Support Call for Additional Forces in Afghanistan*. Terdapat dalam <http://pewresearch.org/pubs/1325/little-support-in-nato-for-afghanistan-troop-increases>, diakses pada [2 Mei 2012].

<sup>29</sup> Pew Research Center. 2011. *Pew Global Attitudes: Supports for War on Afghanistan 2011*. Terdapat dalam <http://www.pewglobal.org/database/?indicator=9&survey=13&response=Keep%20troops%20in%20Afghanistan&mode=chart>, diakses pada [2 Mei 2012].

<sup>30</sup> Jaquemet, Olivier. 2012. *Some Thought After 4 French Soldiers Dies in Afghanistan*. Terdapat dalam <http://echo-sierra.net/2012/01/22/some-thoughts-after-4-french-soldiers-died-in-afghanistan/>, diakses pada [2 Mei 2012].

72% opini publik Prancis menolak intervensi tentara Prancis dalam operasi militer di Afghanistan<sup>31</sup>. Berikut ini adalah tabel data dukungan ISAF:

**Tabel II.8. Jajak Pendapat Dukungan Opini Publik Prancis terhadap ISAF**

Tahun	Prosentase Dukungan
2007	48%
2008	46%
2009	50%
2010	47%
2011	41%

Sumber diolah dari Pew Research Center. 2011. *Pew Global Attitudes: Supports for War on Afghanistan 2011*. Terdapat dalam <http://www.pewglobal.org/database/?indicator=9&survey=13&response=Keep%20troops%20in%20Afghanistan&mode=chart>, diakses pada [2 Mei 2012].

Opini publik yang mendukung kebijakan reintegrasi dalam NATO pada tahun 2009 ternyata tidak menjamin seterusnya publik mendukung NATO. Fakta tersebut di atas menunjukkan opini publik merupakan subjek yang tidak konstan, mereka bergerak berdasarkan kepada informasi dan nilai informasi yang mereka terima.

## II.2.II. Opini Publik Prancis terhadap Kebijakan Memperkuat EU CSDP

Kebijakan memperkuat EU CSDP merupakan salah satu dari dua kebijakan pertahanan dan keamanan pada masa pemerintahan dari Nicolas Sarkozy. Kebijakan tersebut tercantum pada *'white paper policy'* Prancis yang di dalamnya

<sup>31</sup> Merchet, Jean-Dominique. 2011. *72% Des Francais Opposes a l'Intervention Militaire Francais en Afghanistan*. Terdapat dalam [http://www.marianne2.fr/blogsecretdefense/72-des-Francais-opposes-a-l-intervention-militaire-francaise-en-Afghanistan\\_a140.html](http://www.marianne2.fr/blogsecretdefense/72-des-Francais-opposes-a-l-intervention-militaire-francaise-en-Afghanistan_a140.html), diakses pada [3 Mei 2012].

terdapat empat poin penting yaitu meningkatkan kemampuan militer dalam manajemen krisis; mengembangkan pelatihan militer dan sipil; mempromosikan industri militer Eropa; menjadikan Uni Eropa sebagai aktor yang melindungi masyarakatnya<sup>32</sup>. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Nicolas Sarkozy masih menjadi ESDP sebagai fokus kepentingan pertahanan dan keamanan Prancis. Kebijakan tersebut juga sesuai dengan apa yang ada di dalam Perjanjian Lisbon tahun 2008. Dalam Perjanjian Lisbon tersebut bukan hanya nama dari ESDP saja yang berubah menjadi CSDP, tetapi juga terdapat banyak perubahan konstitusional dan operasional di dalam ESDP<sup>33</sup>.

ESDP yang terbentuk tahun 1999 mendapatkan dukungan yang tinggi dari opini publik Prancis yang mencapai 65%<sup>34</sup>. Kemudian pada tahun 2000 dukungan opini publik meningkat menjadi 70% terhadap ESDP. Pada tahun-tahun berikutnya dukungan opini publik Prancis terhadap semakin meningkat. Pada tahun Mei 2001 tercatat 82% opini publik Prancis mendukung kebijakan ESDP<sup>35</sup>. Kemudian pada tahun 2002 dukungan opini publik Prancis berkisar antara 71%-77%. Pada tahun 2003, opini publik Prancis yang mendukung ESDP berkisar pada 74%-77%. Berikut tabelnya:

<sup>32</sup> Pemerintah Republik Prancis, *White Paper Policy*, 2008, Bab 7, Pasal 1-4.

<sup>33</sup> Antonio Missiroli. 2008. *The Impact of The Lisbon Treaty on ESDP*. European Parliament, terdapat dalam <http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?languageEN>, diakses pada [3 Mei 2012].

<sup>34</sup> Olivier Rozenberg, n.d. *La PESC Vue Par l'Opinion Publique Francaise et Europeenne*. L'Institut d'Etudes Politiques de Paris., 495.

<sup>35</sup> Eurobarometer.2003. *Support For Common Foreign and Security Policy (CFSP) is Reinforced*. S.I., h. 3.

**Tabel II.9. Jajak Pendapat Dukungan Opini Publik Prancis terhadap ESDP**

Tahun	Prosentase Dukungan
1999	65%
2000	70%
2001	82%
2002	71%-77%
2003	74%-77%
2006	81%
2007	83%

Sumber diolah dari Eurobarometer, 2003.  
*Support For Common Foreign and Security Policy (CFSP) is Reinforced. S.I., 3.*

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2006 dukungan opini publik Prancis mencapai 81%<sup>36</sup>. Selanjutnya pada tahun 2007, data survei terakhir mengenai dukungan opini publik Prancis terhadap CSDP mencapai 83%<sup>37</sup>. Dalam survei tersebut pertanyaan yang diberikan adalah apakah anda setuju jika CSDP seharusnya independen dari kebijakan luar negeri AS. Apabila dibandingkan dengan dukungan opini publik Prancis terhadap NATO, opini publik Prancis lebih stabil mendukung kebijakan ESDP. Hal tersebut dikarenakan karakteristik opini publik Prancis yang terdapat Anti-Amerikanisme dan Gaullisme di dalamnya.

<sup>36</sup> Eurobarometer 66, 2006, *Public Opinion in European Union: Support For a Common Security And Defense Policy*, 26.

<sup>37</sup> *Public Opinion on CSDP*. 2010. Terdapat dalam [http://ec.europa.eu/public\\_opinion/cf/showchart\\_column.cfm?keyID=2253&nationID=6.&startdate=2007.05&enddate=2007.05](http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/showchart_column.cfm?keyID=2253&nationID=6.&startdate=2007.05&enddate=2007.05), diakses pada [6 Mei 2012].

### II.3. Analisis Volatilitas Opini Publik Prancis

Uraian mengenai karakteristik opini publik Prancis dan kebijakan pertahanan dan keamanan Prancis pada masa Nicolas Sarkozy menunjukkan mengambangya opini publik. Karakter opini publik Prancis yang mempunyai dasar Anti-Amerikanisme dan Gaullisme menolak keberadaan NATO di Eropa. Sementara itu, kebijakan ESDP mendapatkan dukungan yang stabil semenjak pembentukannya. Pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy, NATO mendapatkan lebih banyak dukungan dari opini publik Prancis dari pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2009, penilaian baik opini publik Prancis terhadap NATO mencapai 52%<sup>38</sup>.

Perubahan dari orientasi penilaian opini publik terhadap suatu permasalahan atau isu tak lain dikarenakan oleh sifat dasar dari opini publik sendiri. Karakter dasar opini publik adalah tidak rasional, emosional, tidak memiliki orientasi yang jelas, dan tidak mempunyai informasi<sup>39</sup>. Karakter-karakter tersebut menyebabkan opini publik mempunyai volatilitas yang tinggi. Opini publik Prancis mempunyai kurang informasi mengenai tujuan dari Nicolas Sarkozy dalam kebijakan reintegrasi dalam NATO, pada awalnya menolak kebijakan tersebut. Tetapi, opini publik bisa berubah ketika pemerintahan Nicolas Sarkozy mengomunikasikan dan meyakinkan opini publik maka bisa terjadi penilaian dari opini publik Prancis terhadap NATO maupun AS.

---

<sup>38</sup> Gill, Lucy. 2009. *French Split Over Rejoining NATO*. Terdapat dalam <http://news.bbc.co.uk/2/hi/7937126.stm>, diakses pada [29 April 2012].

<sup>39</sup> Ole R. Holsti, 2004. *Public Opinion and American Foreign Policy*. University of Michigan Press., 7-8.



*Pseudo-environment* dalam opini publik juga menyebabkan mengambangya opini terhadap suatu isu atau permasalahan tertentu. *Pseudo-environment* menyatakan bahwa dunia luar terlalu luas, kompleks dan cepat berlalu untuk dikenali oleh masyarakat<sup>40</sup>. Opini publik yang mempunyai kurang informasi mengenai permasalahan atau isu luar negeri mendapatkan efek dari *pseudo-environment* tersebut. Oleh karena itu, arah orientasi opini mereka mudah terpengaruh dan tidak kuat pada satu pilihan. Hal tersebut merupakan penyebab dari mengambangya opini publik dalam menilai suatu isu atau permasalahan.

Nicolas Sarkozy mengetahui bagaimana karakteristik dan sifat dari opini publik Prancis dalam menilai kebijakan pertahanan dan keamanan. Hal tersebut digunakan oleh Sarkozy untuk merumuskan strategi yang bertujuan untuk membuat opini publik berubah mendukung kebijakan reintegrasi dalam NATO. Strategi tersebut akan dibahas pada bab selanjutnya.

---

<sup>40</sup> Walter Lippman, 1991. *Public Opinion*. New Jersey: Transaction Publisher., 15.

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN PRANCIS: KORELASI ANTARA KEBIJAKAN REINTEGRASI DALAM NATO DAN MEMPERKUAT EU CSDP**

Bab ini membahas bagaimana Nicolas Sarkozy menstimulasi pemikiran dari opini publik Prancis terhadap kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO berdasarkan kepada teori *public appeals*. Hal tersebut dilakukan dengan menetapkan kebijakan lain yang mendapatkan dukungan konstan dari opini publik Prancis. Nicolas Sarkozy pada masa pemerintahannya mengeluarkan dua kebijakan pertahanan dan keamanan yaitu kebijakan reintegrasi dalam NATO dan kebijakan memperkuat CSDP. Dua kebijakan tersebut juga akan dibahas pada bab ini.

### **III.1. Kebijakan Reintegrasi Prancis dalam NATO**

Nicolas Sarkozy pada tahun 2009 mengeluarkan kebijakan yang kontroversial yaitu kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO. Kebijakan tersebut bertolak belakang dengan kebijakan Prancis pada masa pemerintahan presiden sebelumnya. Pada tanggal 3 April 2009 yang bersamaan dengan peringatan 60 tahun hari jadi NATO, Prancis secara resmi bergabung secara penuh dalam NATO<sup>1</sup>. Setelah kebijakan tersebut resmi ditetapkan oleh

---

<sup>1</sup> Gisella Muller dan Brandeek Bacquet, 2009. *France's New NATO Policy: Leveraging a Realignment of the Alliance?*. Strategic Studies Quarterly, Winter 2009, 95.

pemerintahan Prancis terjadi banyak penolakan dari publik. Selain itu, kebijakan tersebut juga menuai kritik dari para politisi dalam pemerintahan Prancis. Kritik dan sikap tidak mendukung tersebut muncul karena Nicolas Sarkozy melanggar tradisi pertahanan dan keamanan Prancis yang independen selama ini.

### III.1.I. Sejarah Kerjasama Prancis dengan NATO

Peran Prancis dalam pertahanan dan keamanan di Eropa pasca Perang Dunia II cukup signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan peran negara tersebut sebagai salah satu negara inisiator dari NATO<sup>2</sup>. Organisasi keamanan dan pertahanan bentukan AS dan beberapa negara Eropa tersebut terbentuk pada tahun 1949. Salah satu tujuan dari terbentuknya NATO adalah membendung komunisme yang disebarkan Uni Soviet. Tujuan tersebut yang membuat banyak negara-negara Eropa yang bergabung dalam NATO.

Pada saat kepemimpinan dari Charles de Gaulle, tepatnya pada tahun 1996, Presiden revolusioner Prancis tersebut memutuskan untuk keluar dari NATO<sup>3</sup>. Keluarnya Prancis dari struktur keanggotaan dari NATO disebabkan oleh beberapa hal yang antara lain adalah pertama, ketidaksetujuan dari Prancis terhadap rencana NATO menjadikan Prancis sebagai tempat instalasi misil nuklir; kedua, penolakan Prancis masuk dalam badan pertahanan udara NATO; ketiga, Charles de Gaulle menerapkan independensi pengembangan nuklir. Penyebab

---

<sup>2</sup>Alastair Cameron dan Jean Pierre Maulny, 2009. *France's NATO Reintegration: Fresh View with the Sarkozy Presidency?*. Royal United Services Institute, Occasional Paper, February 2009., 1.

<sup>3</sup> Ibid.

ketiga tersebut merupakan strategi dari Charles de Gaulle dalam menghadapi persaingan dalam Perang Dingin.

Kebijakan independensi pengembangan nuklir pada masa Perang Dingin dianggap oleh pemerintahan Prancis sebagai langkah efektif dalam menjaga dan mencapai kepentingan negara<sup>4</sup>. Senjata nuklir pada saat Perang Dingin berlangsung memang menjadi ketakutan utama bagi setiap negara yang terlibat di dalamnya. Kebijakan independensi pengembangan nuklir Prancis sudah dirancang sejak tahun 1960-an<sup>5</sup>. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab keluarnya Prancis dari NATO. Dalam keanggotaan NATO, negara anggota harus menyerahkan otoritas pengembangan nuklir mereka di bawah pengawasan NATO.

Selama berlangsung Perang Dingin, independensi pertahanan dan keamanan Prancis masih relevan dalam mempertahankan kepentingan nasional dari negara tersebut. Tetapi, kondisi berbeda terjadi pasca Perang Dingin. AS sebagai negara pemenang dari perang tersebut semakin dalam menyebarkan pengaruhnya di Eropa. Independensi pertahanan dan keamanan Prancis mulai diragukan relevansinya<sup>6</sup>. Kondisi pertahanan dan keamanan Eropa akan semakin buruk apabila AS menarik diri dari Eropa. Hal ini dikarenakan pada pasca Perang Dingin kondisi Eropa Timur masih belum stabil. Hal tersebut ditandai dengan munculnya konflik-konflik horizontal di negara-negara seperti Serbia.

---

<sup>4</sup> Felix Ateaga, 2006. *France's Nuclear Deterrence According to President Chirac: Reform, Clean Break or Reminder?*. Real Instituto Elcano, Area of Security and Defense, 1.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Anand Menon, 1995. *From Independence to Cooperation: France, NATO and European Security*. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944). Vol. 71. No. 1 (Jan. 1995), 22.

Kerjasama atau kedekatan antara Prancis dengan NATO dimulai kembali ketika presiden sosialis Prancis, Francois Mitterand menjabat yaitu pada tahun 1981-1995. Implementasi dari kerjasama tersebut adalah keikutsertaan dari Prancis mengirimkan 14.500 tentara dalam Perang Teluk tahun 1991<sup>7</sup>. Pemerintahan Prancis di bawah Mitterand ini merupakan pertanda mulai lunturnya tradisi pertahanan dan keamanan yang dicetuskan oleh Charles de Gaulle dan dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya. Keikutsertaan Prancis dalam Perang Teluk membawa dampak tersendiri bagi Prancis. Dampak tersebut adalah kesadaran bahwa kemampuan militer mereka jauh lebih inferior dari pada kemampuan yang dimiliki NATO<sup>8</sup>. Isolasionisme yang dilakukan oleh pemerintahan Prancis semenjak Perang Dingin membawa dampak yang membuat pemerintahan Prancis menyadari kelemahan mereka.

Superioritas kekuatan militer AS membawa ketergantungan bagi banyak negara Eropa. Prancis mulai ikut dalam deretan negara yang mempunyai ketergantungan tersebut. Pasca Perang Dingin usai, muncul ketakutan akan ancaman yang muncul di Eropa apabila pasukan militer AS keluar dari Eropa<sup>9</sup>. Dalam beberapa konflik yang muncul di Eropa pasca Perang Dingin seperti Konflik Yugoslavia dan Kosovo, NATO mempunyai peran yang besar dalam penyelesaian konflik tersebut. Hal tersebut dikarenakan Uni Eropa belum mempunyai badan tersendiri yang bergerak di bidang keamanan dan pertahanan.

---

<sup>7</sup> Gisela M.B. Bocquet, 2009. *France's New NATO Policy: Leveraging a Realignment of the Alliance*. Dalam "The Foreign Policy of USA: President Obama's New Course and the Future of Transatlantic Relations.", 2.

<sup>8</sup> Ibid., 3.

<sup>9</sup> Anand Menon, 1995. *From Independence to Cooperation: France, NATO and European Security*. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944). Vol. 71. No. 1 (Jan. 1995), 24.



Pada masa pemerintahan dari Jacques Chirac, pemerintahan Prancis semakin menjalin kerjasama dengan NATO. Hal tersebut ditandai dengan kehadiran dari Menteri Pertahanan Prancis yaitu Francois Leotard dalam Pertemuan Menteri-menteri Pertahanan NATO, meskipun secara informal<sup>10</sup>. Jacques Chirac merupakan Presiden Prancis yang memulai kedekatan antara Prancis dengan NATO. Tujuannya adalah mengambil alih Komando Pertahanan Eropa Selatan yang berada di Naples<sup>11</sup>. Langkah yang dilakukan oleh Chirac adalah memasukkan Prancis dalam Dewan Pertahanan NATO pada tahun 1995. Kerjasama antara Prancis dengan NATO yang terangkum dalam *Common Joint Task Force* (CJTF) merupakan latar belakang dari tujuan Prancis yang lebih dekat dengan NATO. Tetapi, Prancis belum bisa mencapai tujuannya tersebut karena mendapatkan penolakan dari AS.

Pada masa kepemimpinan Chirac telah banyak kontribusi yang dilakukan oleh Prancis terhadap NATO secara *de facto*<sup>12</sup>. Prancis tergabung dalam *Allied Command Transformation* (ACT) dan *Contingent of Supreme Headquarters Allied Powers* yang berlokasi di Belgia. Selain itu, Prancis secara finansial merupakan penyumbang dana ketiga terbesar dalam NATO. Prancis juga merupakan negara ketiga terbesar penyumbang tentara dalam setiap operasi NATO. Meskipun memiliki kontribusi yang signifikan dalam NATO, Prancis

---

<sup>10</sup> Gisela M.B. Bocquet, 2009. *France's New NATO Policy: Leveraging a Realignment of the Alliance*. Dalam "The Foreign Policy of USA: President Obama's New Course and the Future of Transatlantic Relations.", 6.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Alastair Cameron dan Jean Pierre Maulny, 2009. *France's NATO Reintegration: Fresh View with the Sarkozy Presidency?*. Royal United Services Institute, Occasional Paper, February 2009., 2.

belum bisa memiliki pengaruh yang spesifik dalam NATO<sup>13</sup>. Hal tersebut merupakan kelemahan dari kebijakan dari Jacques Chirac.

Pada tahun 2007, ketika Nicolas Sarkozy menggantikan posisi dari Jacques Chirac, merupakan puncak dari kedekatan hubungan antara Prancis dengan NATO. Hal tersebut ditandai dengan masuknya secara resmi Prancis dalam struktur keanggotaan NATO pada 3-4 April 2009.

### **III.1.II. Hubungan Prancis dan NATO pada masa Pemerintahan Nicolas Sarkozy**

Pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy merupakan puncak dari kedekatan antara Prancis dengan NATO. Tepatnya pada tanggal 3-4 April 2009, bersamaan dengan peringatan 60 tahun berdirinya NATO, Nicolas Sarkozy menyatakan secara resmi bergabung dengan NATO<sup>14</sup>. Kebijakan reintegrasi Prancis ke dalam NATO ini merupakan terobosan yang dilakukan Nicolas Sarkozy pada masa pemerintahannya. Hubungan antara Prancis dengan NATO memang mulai terjalin sejak masa pemerintahan Francois Mitterand. Tetapi, baru pada pemerintahan Nicolas Sarkozy, Prancis berani secara penuh masuk dalam keanggotaan NATO.

Beberapa isu luar negeri menunjukkan bahwa pemerintahan Nicolas Sarkozy mempunyai kecenderungan Atlanticist<sup>15</sup>. Pertama adalah kehadiran dari pasukan militer Prancis dalam operasi militer di Afghanistan. Operasi militer tersebut merupakan hasil dari resolusi PBB untuk menangani pemberontakan

<sup>13</sup> Bacquet, Op.Cit., 7.

<sup>14</sup> Ibid., 9.

<sup>15</sup> Frederic Bozo, 2008. *France and NATO under Sarkozy: End of the French Exception?*. Paris: Working Paper of Foundation Pour L'Innovation Politique., 4.

Taliban tergabung dalam ISAF (*International Service of Armed Force*)<sup>16</sup>. Tetapi, ide dari resolusi tersebut adalah dari AS. Kedua adalah isu pengembangan nuklir di Iran. Prancis dalam hal ini mendukung apa yang dilakukan oleh AS dengan terus menekan Ahmadinejad lebih terbuka terhadap proyek-proyek proliferasi nuklir negaranya. Di saat negara lain seperti Israel berencana melakukan serangan militer terhadap Iran, Nicolas Sarkozy mengusulkan kepada semua negara untuk menghentikan impor minyak mentah dan membekukan aset bank nasional Iran yang ada di negara masing-masing<sup>17</sup>. Ketiga adalah semakin berkembangnya kerjasama bilateral diantara Prancis dengan AS. Kerjasama bilateral antara Prancis dengan AS berkembang di bidang perdagangan dan investasi<sup>18</sup>.

Pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy, Prancis mendukung kebijakan luar negeri atau tindakan yang dilakukan oleh AS seperti yang telah disebutkan di atas. Diantara presiden Prancis Republik V, Nicolas Sarkozy adalah presiden yang paling mempunyai kedekatan dengan AS. Hal tersebut terbukti ketika Nicolas Sarkozy mengumpulkan para duta besar tak lama setelah dia diangkat secara resmi sebagai Presiden Prancis. Isi dari pertemuan pada 27 Agustus 2007 tersebut adalah mengumumkan rencana Nicolas Sarkozy untuk memasukkan Prancis secara penuh dalam keanggotaan NATO<sup>19</sup>. Hal tersebut mengejutkan karena pada

<sup>16</sup> Paul Belkin, 2011. *France: Factors Shaping Foreign Policy and Issues in US-French Relations*. Congressional Research Services, terdapat dalam [www.crs.gov](http://www.crs.gov), RL326464., 16.

<sup>17</sup> “Iran Threat “Unacceptable”, Said Sarkozy”. 2011. Terdapat dalam <http://www.france24.com/en/20111121-sarkozy-unprecedented-sanctions-iran-iaea-report-nuclear-programme-france>, diakses pada [19 Februari 2012].

<sup>18</sup> Paul Belkin, 2011. *France: Factors Shaping Foreign Policy and Issues in US-French Relations*. Congressional Research Services, terdapat dalam [www.crs.gov](http://www.crs.gov), RL326464., 21.

<sup>19</sup> Gisela M.R. Bacquet, 2009. *France’s New NATO Policy: Leveraging a Realignment of the Alliance*. Dalam “The Foreign Policy of USA: President Obama’s New Course and the Future of Transatlantic Relations.”, 8.

masa kampanyenya, Nicolas Sarkozy tidak pernah menyebutkan rencananya tersebut.

Pada awal kepemimpinannya, Nicolas Sarkozy juga mengeluarkan kebijakan pertahanan dan keamanan lain yaitu kebijakan memperkuat EU CSDP<sup>20</sup>. Kebijakan tersebut merupakan upaya dari Nicolas Sarkozy memperkuat struktur dan teknis operasi kerjasama kemanan dan pertahanan Eropa tersebut. Semenjak tahun 2008, Prancis menjabat sebagai Presiden Uni Eropa. Oleh karena itu, Nicolas Sarkozy harus memikirkan kepentingan Eropa dalam kebijakan luar negerinya. Dalam pidatonya mengenai dualitas kebijakan pertahanan dan keamanannya, Nicolas Sarkozy menyatakan:

*“I hope that in the coming months we can pursue both the strengthening of Europe of defense and the renewal of NATO, as well as NATO relationship to France in general. Each bound up together with other : an autonomous Europe of defense and transatlantic alliance in which we will be able play our role its fullest extent.”<sup>21</sup>*

Pernyataan tersebut disampaikan untuk mengklarifikasi bahwa antara dua kebijakan pertahanan dan keamanan Prancis tidak mengandung unsur rivalitas. Hal tersebut dikarenakan banyak kritik dan pertanyaan yang muncul dari publik mengenai arah kebijakan pertahanan dan keamanan dari Prancis pada masa

<sup>20</sup> Luis S. Navarro, 2008. *Sarkozy's Dilemmas, The Forthcoming EU Presidency and ESDP: What's in it Europe?*. Real Instituto Elcano, Area: Eropa ARI 76/2008, 7 Juli 2008., 3.

<sup>21</sup> “Pidato Nicolas Sarkozy di Kongres AS”. 7 November 2007.

<http://www.elysee.fr/edito/index.php?id=23>. Terdapat dalam Gisela M.R. Bacquet. 2009. France's New NATO Policy: Leveraging a Realignment of the Alliance. Dalam “The Foreign Policy of USA: President Obama's New Course and the Future of Transatlantic Relations., 8.



kepemimpinan Nicolas Sarkozy. Status Prancis sebagai Presiden Uni Eropa membuat pertanyaan dan kritik tersebut muncul ke permukaan.

Kedua kali, Nicolas Sarkozy menyampaikan rencananya untuk memasukkan secara penuh Prancis dalam keanggotaan NATO adalah sebelum Sidang Kongres AS pada 7 November 2007<sup>22</sup>. Pada pidatonya tersebut, Nicolas Sarkozy menyampaikan bahwa dengan masuknya kembali Prancis sebagai anggota dari NATO akan memperbaiki hubungan trans-atlantik. Karena Prancis merupakan salah satu negara kontributor dan inisiator dari terbentuknya NATO. Nicolas Sarkozy juga mengungkapkan bahwa masuknya Prancis ke dalam NATO juga berpengaruh terhadap kuatnya pertahanan dan keamanan Eropa.

Pada 3 April 2008, untuk ketiga kalinya Nicolas Sarkozy menyatakan rencana reintegrasi Prancis dalam NATO<sup>23</sup>. Pernyataan tersebut dilakukan Nicolas Sarkozy dalam Pertemuan NATO di Bucharest. Setelah itu, Prancis menambah jumlah pasukan militernya di Afghanistan sebanyak 1.000 personel tentara. Hal tersebut merupakan langkah nyata dari keseriusan Prancis melakukan reintegrasi dalam NATO. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Nicolas Sarkozy tersebut di atas mendapatkan apresiasi yang besar dari AS sebagai negara yang memimpin NATO selama ini.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Kongres dengan selisih angka 329-298 pada 17 Maret 2009, Prancis menetapkan kebijakan reintegrasi dalam

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid., 9.



NATO<sup>24</sup>. Prosesi resmi dari pemerintahan Prancis mengenai reintegrasi Prancis dalam NATO terjadi pada 3-4 April 2009 yaitu pada peringatan 60 tahun berdirinya NATO di Kehl dan Strasbourg<sup>25</sup>. Normalisasi hubungan trans-atlantik antara NATO dan Prancis ini membawa banyak konsekuensi dari kedua belah pihak. Bagi pemerintahan Prancis, mereka harus berhadapan dengan kritik mengenai kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO yang tidak sesuai dengan tradisi Gaullisme. NATO dalam hal ini berhati-hati terhadap masuknya Prancis dalam keanggotaan penuh. Karena hal tersebut semakin memperkuat posisi Eropa dalam aliansi.

### III.1.III. Kepentingan Prancis dalam NATO

Pemerintahan Prancis dalam menetapkan kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO mempunyai kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai dalam NATO. Kebijakan reintegrasi dalam NATO bukan satu-satunya kebijakan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan pemerintahan Prancis. Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Nicolas Sarkozy adalah kebijakan untuk memperkuat EU CSDP sesuai dengan Perjanjian Lisbon tahun 2008. Kebijakan memperkuat EU CSDP ini merupakan kepanjangan dari CFSP (*Common Foreign and Security Policy*)<sup>26</sup>. Pada tahun 2008, Prancis secara resmi menjabat sebagai Presiden dari

<sup>24</sup> Paul Belkin, 2011. *France: Factors Shaping Foreign Policy and Issues in US-French Relations*. Congressional Research Service, 7-5700 dalam [www.crs.com](http://www.crs.com) RL32464, 13.

<sup>25</sup> Gisela M.R. Bacquet, 2009. *France's New NATO Policy: Leveraging a Realignment of the Alliance*. Dalam "The Foreign Policy of USA: President Obama's New Course and the Future of Transatlantic Relations.", 9.

<sup>26</sup> "Common Security and Defence Policy". 2010. Terdapat dalam [http://europa.eu/legislation\\_summaries/institutional\\_affairs/treaties/lisbon\\_treaty/ai0026\\_en.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0026_en.htm), diakses pada [22 Pebruari 2012].

Uni Eropa. Hal tersebut membuat Prancis harus juga mempertimbangkan kepentingan dari Uni Eropa dalam kebijakan luar negeri yang dikeluarkannya.

Kebijakan reintegrasi dalam NATO yang dilakukan oleh pemerintahan Prancis bertujuan untuk memperkuat CSDP karena bisa bekerjasama dengan NATO<sup>27</sup>. Selama ini perkembangan dari CSDP lambat semenjak ditetapkan tahun 1999 disebabkan oleh ketidakikutsertaan Prancis dalam NATO. Oleh karena itu, bergabungnya Prancis dalam NATO diharapkan mampu mendukung perkembangan lebih lanjut dari CSDP. Reintegrasi Prancis dalam NATO juga mempunyai tujuan untuk memperkuat posisi dari Uni Eropa dalam NATO<sup>28</sup>. Salah satu pendorong Prancis untuk masuk ke dalam keanggotaan NATO adalah adanya regulasi baru mengenai peran dan porsi yang sama anggota. Regulasi tersebut memungkinkan kolektivitas Uni Eropa dalam NATO menjadi kuat. Kemudian secara tidak langsung bisa mendukung posisi dari Uni Eropa dalam pengambilan keputusan dalam NATO.

Sebelum Nicolas Sarkozy memutuskan untuk melakukan reintegrasi ke dalam NATO. Dia menyatakan bahwa NATO tidak seharusnya melakukan operasi militer atau kegiatan pertahanan dan keamanan di luar Eropa<sup>29</sup>. Nicolas Sarkozy menyatakan, “*une organization de defense sans ancrage geopolitique n’a pas de sens, et n’a donc pas d’avenir*” dan “*l’OTAN ne doit pas se disperser et etre denaturee*”<sup>30</sup>. Pernyataan tersebut mempunyai arti bahwa Nicolas Sarkozy

<sup>27</sup> Ibid., 10.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Antonio Ortiz, 2007. *Sarkozy’s Defence Policy: A Early Look*. Real Instituto Elcano, Area: Security and Defence, ARI 69/2007, 21/6/2007., 3.

<sup>30</sup> Ibid.

menginginkan NATO sebagai organisasi yang benar-benar trans-atlantik. Oleh karena itu, NATO tidak seharusnya berubah dari organisasi pertahanan yang sebelumnya. Secara tidak langsung pernyataan dari Nicolas Sarkozy tersebut merupakan persyaratan bagi NATO apabila ingin Prancis masuk ke dalam keanggotaan dari organisasi tersebut.

Persyaratan yang diberikan oleh Nicolas Sarkozy di atas mendukung tujuan dari Prancis untuk memperkuat posisi dari Uni Eropa dalam keanggotaan NATO yang dimonopoli oleh AS. Selain itu, hal tersebut membuat NATO tidak meninggalkan Eropa dan mendukung pertahanan kolektif yang ada dalam Uni Eropa yaitu CSDP. Semenjak diperbaharui melalui Perjanjian Lisbon tahun 2008 beberapa operasi militer dilakukan oleh CSDP dan sebagian besar bekerja sama dengan NATO<sup>31</sup>.

Selain memperjuangkan kepentingan dari Eropa dalam NATO, pemerintahan Prancis mempunyai tujuan tersendiri dalam reintegrasi ke dalam NATO. Semenjak Francois Mitterand memulai kerjasama militer dengan NATO sampai dengan kepemimpinan Jacques Chirac belum terdapat indikasi masuknya Prancis ke dalam NATO. Tetapi, Nicolas Sarkozy berani untuk melakukan revolusi dalam kebijakan independensi pertahanan dan keamanan Prancis. Kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO sudah mulai dibicarakan Nicolas Sarkozy dalam pemerintahan setelah dia resmi menjabat sebagai presiden tahun

---

<sup>31</sup> “ *Eu Common Security and Defence Policy*”. 2011. Terdapat dalam <http://www.civitas.org.uk/eufacts/FSEX/EX4.htm>, diakses pada [22 Februari 2012].

2007. Nicolas Sarkozy dan pemerintahan Prancis mempunyai beberapa tujuan khusus dalam kebijakan tersebut.

Kebijakan reintegrasi Prancis dalam keanggotaan NATO membuat banyak angkatan bersenjata Prancis mengisi posisi penting dalam NATO<sup>32</sup>. Keanggotaan penuh Prancis dalam NATO membawa konsekuensi pada semakin banyaknya petinggi militer Prancis yang menduduki posisi penting dalam struktur koordinasi NATO. Hal tersebut membuat Prancis mempunyai peran dalam proses pembuatan keputusan dalam NATO. Peran tersebut juga memainkan fungsinya sebagai alat untuk menyebarkan pengaruh dari Prancis dalam NATO. Seperti yang telah disinggung di atas bahwa gaya kepemimpinan Nicolas Sarkozy yang berbeda dengan pemimpin Prancis sebelumnya. Tetapi, kepentingan yang ingin dicapai oleh negara itu tetap sama.

Prancis membawa sekitar 500-800 personil militer yang mengisi posisi dalam struktur NATO<sup>33</sup>. Hal tersebut merupakan keuntungan yang didapatkan Prancis dengan bergabung dalam NATO. Semakin banyak personil militer yang ada dalam struktur NATO membuat semakin kuatnya posisi Prancis dalam organisasi tersebut. Di satu sisi, personil militer Prancis yang masuk dalam struktur NATO menjadi ancaman bagi negara lain. Karena posisi negara anggota NATO yang lain akan digantikan oleh personil militer Prancis<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Tomas Valasek, 2007. *The Roadmap of Better EU-NATO Relations*. Centre for European Reforms., 4.

<sup>33</sup> Katia Zatuliveter. 2009. *France's Changing Role in NATO*. Terdapat dalam <http://www.defenceviewpoints.co.uk/articles-and-analysis/france-s-changing-role-in-nato>, diakses pada [27 Februari 2012].

<sup>34</sup> Ibid.

Kebijakan reintegrasi dalam NATO merupakan langkah pragmatis yang ditempuh untuk mendapatkan kepentingan nasional Prancis<sup>35</sup>. Karena selama ini Prancis membangun organisasi keamanan dan pertahanan independen tanpa dukungan yaitu CSDP. Bentuk dari pertahanan dan keamanan Eropa independen yang dibentuk Prancis dalam Uni Eropa tersebut pada awalnya bertujuan untuk menyaingi keberadaan dari NATO di Eropa<sup>36</sup>. Melihat perkembangan dari CSDP yang lambat membuat Nicolas Sarkozy lebih pragmatis.

Kebijakan reintegrasi dalam keanggotaan NATO juga bertujuan untuk meningkatkan industri persenjataan di Prancis pada khususnya dan Eropa pada umumnya. Salah satu inferioritas dari pertahanan dan keamanan Prancis adalah dalam bidang persenjataan yang tertinggal dari AS. Reintegrasi ke dalam keanggotaan NATO memungkinkan Prancis untuk bisa meningkatkan teknologi militernya. *European Aeronautic Defense and Space (EADS)* yang berada di Toulouse menjadi salah satu konsentrasi dari Nicolas Sarkozy untuk didorong produktivitasnya<sup>37</sup>. Salah satu jalannya adalah dengan masuk ke dalam NATO.

Salah satu objektif dalam kebijakan pertahanan dan keamanan Nicolas Sarkozy bukan kepada lingkungan pertahanan, tetapi lebih kepada ekonomi pertahanan<sup>38</sup>. Usaha untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas industri persenjataan Prancis termasuk di dalam objektif tersebut. Salah satu jalan yang bisa ditempuh oleh Prancis adalah menjadi anggota dari NATO. Organisasi

---

<sup>35</sup> Alastair Cameron dan Jean Pierre Maulmy, 2009. *France's NATO Reintegration: Fresh View with the Sarkozy Presidency?*. Royal United Service Institute, Occasional Paper, Pebruari 2009., 7.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 5-6.

<sup>37</sup> Antonio Ortiz, 2007. *Sarkozy's Defence Policy: A Early Look*. Real Instituto Elcano, Area: Security and Defence, ARI 69/2007, 21/6/2007., 1.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 4.



pertahanan dan keamanan trans-atlantik tersebut merupakan pasar bagi Prancis untuk memasarkan produknya. Selain mengincar pasar dalam NATO, Prancis dalam reintegrasinya dalam NATO bisa meniru dan bekerjasama dengan AS dalam industri persenjataan. Pada tahun 2009, Prancis menjual perlengkapan militernya yaitu berupa misil atau jarak dekat kepada Rusia dengan jumlah pembelian 2 milyar Euro<sup>39</sup>. Fakta tersebut menunjukkan bagaimana Nicolas Sarkozy mengimplementasikan tujuan untuk mencapai ekonomi pertahanan yang telah ditetapkan.

Terdapat tiga kepentingan yang ingin dicapai oleh pemerintahan Prancis dengan bergabung dalam NATO. Pertama adalah untuk mencapai kepentingan nasional terutama dalam bidang ekonomi militer. Kedua adalah menyebarkan pengaruh dalam NATO, bahkan bisa mengambil alih NATO. Ketiga adalah mencapai kepentingan pertahanan dan keamanan Eropa dalam CSDP. Untuk kepentingan yang ketiga berhubungan dengan status presiden Uni Eropa yang didapatkan Prancis semenjak tahun 2008.

### **III.2. Kebijakan Memperkuat EU CSDP**

Kebijakan memperkuat EU CSDP adalah kebijakan pertahanan dan keamanan selain kebijakan reintegrasi dalam NATO yang ditetapkan pemerintahan Prancis pada masa kepemimpinan dari Nicolas Sarkozy. Dua kebijakan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintahan Prancis

---

<sup>39</sup> Marcel H. Van Herpen, 2009. *Why France Rejoins NATO: Wooing Britain?*. Cicero Foundation Great Debate Paper No. 09/11., 5.

sering mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Dua kebijakan sekaligus membuat pemerintahan Prancis tidak fokus. Namun, seperti yang dinyatakan oleh Nicolas Sarkozy bahwa dua kebijakan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan Prancis bersifat komplementer<sup>40</sup>. Kebijakan reintegrasi dalam NATO akan mendukung kebijakan memperkuat CSDP dan begitu pula sebaliknya. Berikut ini dibahas mengenai kebijakan memperkuat EU CSDP yang digunakan oleh Nicolas Sarkozy sebagai *appeal* atau stimulan dari kebijakan reintegrasi dalam NATO. Hal tersebut berfungsi untuk meyakinkan publik terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintahan Prancis.

### III.2.I. Sejarah EU CSDP

EU CSDP merupakan perubahan dari *European Security and Defense Policy* (ESDP) yang dibentuk pada tahun 1999. Awal mula terbentuknya ESDP adalah ketika Prancis dan Inggris bertemu di St. Malo tahun 1998 yang membahas permasalahan pertahanan dan keamanan Eropa<sup>41</sup>. Hasil dari pertemuan tersebut adalah Deklarasi St. Malo yang merupakan cikal bakal dari ESDP yang resmi dibentuk pada tahun 1999. ESDP merupakan satu bentuk integral dengan

<sup>40</sup> “Pidato Nicolas Sarkozy di Kongres AS”. 7 November 2007.

<http://www.elysee.fr/edito/index.php?id=23>. Terdapat dalam Gisela M.R. Bacquet. 2009. France’s New NATO Policy: Leveraging a Realignment of the Alliance. Dalam “The Foreign Policy of USA: President Obama’s New Course and the Future of Transatlantic Relations.”, 8.

<sup>41</sup> Giovanni Grevi, et al, 2009. *European Security and Defence Policy The First 10 Years (1999-2009)*. EU Institute for Security and Defence Policy., 13.

*Common Foreign and Security Policy (CFSP)*<sup>42</sup>. CFSP merupakan bentuk integrasi dari negara-negara Uni Eropa dalam bidang kebijakan keamanan.

Sebelum adanya pertemuan antara Inggris dengan Prancis yang membahas mengenai pertahanan dan keamanan Eropa, sudah terdapat bentuk kerjasama pertahanan dan keamanan kolektif yaitu *Western European Union (WEU)*. WEU merupakan jembatan bagi Uni Eropa dengan NATO dalam melakukan kerjasama<sup>43</sup>. Pada akhir 1997, beberapa misi kemanusiaan maupun penanganan konflik telah dilakukan oleh UE bekerja sama dengan NATO. Kebijakan pertahanan dan keamanan Uni Eropa sebelum terbentuknya ESDP masih berada langsung di bawah CFSP yang merupakan pilar kedua dalam Uni Eropa.

Satu tahun setelah pertemuan antara Prancis dengan Inggris di St. Malo, Uni Eropa akhirnya menetapkan pembentukan ESDP pada tahun 1999 di Helsinki<sup>44</sup>. Kebijakan Uni Eropa untuk membentuk ESDP disebut juga dengan *Helsinki Headline Goal (HHG)*. Dalam HHG tersebut terdapat target dari negara-negara Uni Eropa untuk bisa mengirimkan 60.000 pasukan militer dalam 60 hari meliputi misi manajemen krisis, menciptakan perdamaian dan menjaga perdamaian. Meskipun Inggris tidak setuju dengan ESDP, Uni Eropa terus mengembangkan ESDP<sup>45</sup>. Pada waktu itu Tony Blair yang menjabat sebagai perdana menteri

<sup>42</sup> “*Common Security and Defence Policy*”. 2010. Terdapat dalam [http://europa.eu/legislation\\_summaries/institutional\\_affairs/treaties/lisbon\\_treaty/ai0026\\_en.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0026_en.htm), diakses pada [29 Pebruari 2012].

<sup>43</sup> Giovanni Bovo, 2002. *European Union Defence and Security Policy: Theoretical Approaches*. The Nice Summit and Hot Issues. Bradford University: Peace Studies Department., 14.

<sup>44</sup> “*EU Common Security and Defence Policy*”. 2010. Terdapat dalam <http://www.civitas.org.uk/eufacts/FSEX/EX4.htm>, diakses pada [2 Maret 2012].

<sup>45</sup> Claire Taylor, 2006. *European Security and Defence Policy: Developments Since 2003*. House of Common Library, Research Paper 06/32, 8 Juni 2006., 9.

Inggris menyatakan bahwa pembentukan ESDP bisa menjadi duplikat dari NATO. Jadi, ESDP nantinya akan mendeskreditkan NATO.

Meskipun kurang mendapatkan dukungan dari Inggris, program ESDP terus dikembangkan oleh Uni Eropa. Pada tahun 2000 diadakan Pertemuan Nice yang menghasilkan Perjanjian Nice. Salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah semakin memperkuat ESDP sebagai organisasi pertahanan dan keamanan Uni Eropa. Dalam Perjanjian Nice tahun 2000 tersebut terdapat amandemen terhadap artikel 17 Perjanjian Uni Eropa<sup>46</sup>. Amandemen tersebut menyebutkan bahwa manajemen krisis yang selama ini dipegang oleh WEU diserahkan kepada Uni Eropa. Hal ini dikarenakan Uni Eropa merasa bahwa WEU sudah berlebihan. Amandemen tersebut semakin memperkuat struktur permanen dari ESDP dalam manajemen krisis dan badan pertahanan Eropa. Penolakan masyarakat Irlandia terhadap Perjanjian Nice membuat usaha untuk memperkuat struktur ESDP tertunda sampai dengan persetujuan dari Irlandia pada tahun 2002<sup>47</sup>.

Dalam Uni Eropa terdapat yang disebut dengan *European Security Strategy* (ESS) yang merupakan pedoman bagi ESDP dalam menjalankan misinya. ESS bisa juga dikatakan sebagai objektif dari Uni Eropa dalam pertahanan dan keamanan wilayah. Pada tahun 2003, ESS mengeluarkan beberapa objektif yang disebut dengan istilah "*pre-emptive engagement*". Dalam objektif tersebut terdapat tiga fokus utama dalam isu keamanan yaitu terorisme, proliferasi nuklir

---

<sup>46</sup> Neil Winn, 2003. *CFSP, CSDP and the Future of European Security: Whither NATO?*. The Brown Journal of World Affairs, Winter/ Spring, 2003-Vol. IX, Issue 2., 154.

<sup>47</sup> Ibid., 155.

dan organisasi kriminal dan negara gagal<sup>48</sup>. Tetapi, istilah tersebut ternyata mendapatkan kritik karena mirip dengan kebijakan keamanan dari AS yang disebut dengan “*pre-emptive attack*”. Oleh karena itu, pada Desember 2003, Uni Eropa meralat ESS. Istilah “*pre-emptive engagement*” diganti menjadi “*preventive engagement*”. Dalam ralat ESS Uni Eropa ini terdapat lima fokus isu keamanan yaitu terorisme, proliferasi nuklir, organisasi kriminal, konflik regional dan negara gagal<sup>49</sup>. Pada tahun-tahun berikutnya, ESDP beroperasi berdasar kepada ESS yang telah ditentukan tersebut.

Perkembangan terakhir dari ESDP terjadi pada tahun 2008 yaitu terangkum dalam Perjanjian Lisbon. Perjanjian tersebut menandai transformasi dari ESDP menjadi CSDP (*Common European Defence and Security Policy*). Transformasi dari ESDP bukan hanya sekedar nama saja, tetapi juga adanya mekanisme baru dalam mengembangkan kapabilitas, struktur kerjasama yang permanen yang memungkinkan negara anggota meningkatkan integrasi dalam kerangka Uni Eropa<sup>50</sup>.

### III.2.II. Kepentingan Prancis dalam EU CSDP

Pada masa pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy, Prancis semakin memperkuat posisinya dalam mendukung kerjasama pertahanan dan keamanan Eropa. Dalam *White Paper Policy* Pemerintahan Prancis tahun 2008 disebutkan

<sup>48</sup> Claire Taylor, 2006. *European Security and Defence Policy: Developments Since 2003*. House of Common Library, Research Paer 06/32, 8 Juni 2006., 10.

<sup>49</sup> Ibid., 13.

<sup>50</sup> Sven Biscop. 2010. *From ESDP to CSDP: Time for some Strategy*. Terdapat dalam <http://www.diploweb.com/From-ESDP-to-CSDP-Time-for-some.html>, diakses pada [4 Maret 2012].



bahwa kerjasama pertahanan dan keamanan Eropa diperlukan keberadaannya dan pemerintahan Prancis siap untuk bekerjasama dengan negara-negara Uni Eropa lainnya dalam menjaga pertahanan dan keamanan dalam bentuk operasi gabungan maupun finansial<sup>51</sup>. Hal tersebut menunjukkan konsistensi dari Prancis dalam memberikan dukungan terhadap kerjasama pertahanan dan keamanan Eropa.

Tujuan Prancis dalam mengajak Inggris untuk menyetujui dan mendukung pembentukan ESDP sudah terlihat pada pertemuan antara Prancis dengan Inggris di St. Malo. Prancis menginginkan adanya kekuatan yang mengimbangi posisi AS di Eropa yang direpresentasikan dengan keberadaan NATO<sup>52</sup>. Hal tersebut menunjukkan masih besarnya ide-ide de Gaulle yang ada dalam pemerintahan Prancis pada waktu peristiwa tersebut terjadi. Apabila terdapat keseimbangan antara kekuatan AS di Eropa dengan kekuatan Eropa maka Prancis akan mendapatkan tiga keuntungan. Tiga keuntungan tersebut adalah kekuatan nasional Prancis bertambah; hal tersebut akan mengembalikan posisi Eropa dalam urusan internasional; kerjasama yang menghasilkan ESDP tersebut akan mengimbangi kekuatan AS yang besar di Eropa<sup>53</sup>.

Pemerintahan Prancis dalam merumuskan ESDP sebagai organisasi pertahanan dan keamanan Eropa mempunyai beberapa kepentingan. Kepentingan tersebut antara lain adalah geo-strategis; pengembangan persenjataan; usaha untuk mengimbangi kekuatan AS. Pada Pertemuan St. Malo secara khusus Prancis

---

<sup>51</sup> Pemerintah Republik Prancis, *White Paper Policy*, 2008, Bab 7, Pasal 1-4.

<sup>52</sup> Jolyon Howorth. 2002. *France, NATO and European Security: Status Quo Unsustainable; New balance Unattainable*. French Institute of International Relations., 1.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 2.

bernegosiasi dengan Inggris untuk mendukung terbentuknya organisasi pertahanan dan keamanan Eropa yang independen. Hal tersebut dilakukan karena pemerintahan Prancis menyadari bahwa tanpa Inggris rencana tersebut tidak akan tercapai.

Semenjak berdirinya ESDP pada tahun 1999, kerjasama pertahanan dan keamanan Eropa tersebut mengalami perkembangan yang lambat. Hal tersebut disebabkan oleh kontribusi dan kapabilitas militer NATO yang besar di Eropa. Kondisi tersebut diperburuk dengan kebijakan 'war on terrorism' yang dikeluarkan AS pasca peristiwa 9/11. Tindakan AS tersebut membuat negara-negara Eropa lebih mendukung dan lebih fokus untuk ikut dalam kebijakan tersebut<sup>54</sup>. Selama terbentuknya ESDP sampai dengan sekarang ini, kerjasama pertahanan dan keamanan dalam Uni Eropa tersebut merupakan alat bagi Prancis dalam mencapai kepentingan. 'Europe Puissance' adalah visi dan misi dari Prancis dalam kebijakan luar negerinya<sup>55</sup>. Istilah tersebut menggambarkan suatu kekuatan global yang memiliki kebijakan sendiri, mempertahankan nilai-nilai negara dan mempromosikan kepentingannya secara global. Pembentukan ESDP merupakan salah satu cara bagi Prancis untuk mendapatkan apa yang disebut dengan 'Europe Puissance' tersebut.

Selama puluhan tahun semenjak pemerintahan dari Charles de Gaulle, Prancis mencoba membangun kerjasama militer Eropa yang independen. Tujuan dari kebijakan tersebut tak lain adalah untuk mengimbangi kekuatan AS di Eropa

---

<sup>54</sup> Ibid., 15.

<sup>55</sup> Bastian Irondele dan Frederic Merand 2010. *France's Return to NATO: Death Knell for ESDP?*. Dalam *European Security* Vol.19, No. 1, Maret 2010, h. 29-43. London: Routledge., 31.

melalui NATO dan mendapatkan pengaruh atas negara-negara Eropa lainnya. Pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy sekarang ini, kerjasama pertahanan dan keamanan yang sudah terbentuk yaitu ESDP dipertaruhkan kelangsungannya. Kebijakan Nicolas Sarkozy memasukkan Prancis sebagai anggota penuh NATO membuat banyak pengamat politik berspekulasi mengenai masa depan dari ESDP yang semenjak tahun 2008 berganti nama menjadi EU CSDP.

### **III.3. Analisa Korelasi antara Kebijakan Reintegrasi dalam NATO dan Memperkuat EU CSDP**

Dualisme kebijakan pertahanan dan keamanan dari Presiden Prancis sekarang ini bukan merupakan indikator yang menunjukkan adanya kepanikan atau kebingungan dari seorang presiden dalam menghadapi tantangan. Selain kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai oleh Nicolas Sarkozy dalam dua kebijakan tersebut di atas, dua kebijakan yang dinilai di mata publik Prancis sebagai dua kebijakan pertahanan dan keamanan yang bertentangan adalah sebuah strategi. Terdapat dua sisi kepentingan yang ingin dicapai Nicolas Sarkozy dalam masa pemerintahannya sebagai presiden Prancis. Dua sisi kepentingan tersebut adalah kepentingan dalam hubungan internasional negara yang dipimpinnya dan kepentingannya sebagai presiden yang ingin mendapatkan dukungan dari rakyatnya.

Dua kebijakan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan Nicolas Sarkozy pada masa pemerintahannya mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan pengaruh Prancis di Eropa. Akan tetapi, hal tersebut merupakan pertarungan bagi

Nicolas Sarkozy. Hal tersebut berlaku karena dua kebijakan pertahanan dan keamanan tersebut mempunyai objektif yang berbeda. Kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO akan berdampak besar pada perkembangan dari EU CSDP. Nicolas Sarkozy dalam menetapkan kebijakan reintegrasi dalam NATO mempunyai empat alasan utama yaitu kekecewaan Nicolas Sarkozy atas pencapaian dari EU CSDP yang masih belum memuaskan; stagnasi institusi yang ada dalam EU CSDP yang muncul karena belum maksimalnya Inggris mendukung kerjasama tersebut; kontribusi besar Prancis dalam NATO semenjak tahun 1995; hal tersebut merupakan strategi dari Sarkozy agar Prancis mendapatkan posisi yang strategis dalam NATO mengingat kontribusi besar negara tersebut<sup>56</sup>.

Alasan tersebut di atas semakin menguatkan argumen bahwa Gaullisme sudah pudar pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy. Kebijakan reintegrasi ke dalam NATO merupakan pertarungan terhadap masa depan dari EU CSDP. Pertarungan tersebut menyajikan munculnya beberapa spekulasi mengenai dampak dari kebijakan reintegrasi dalam NATO oleh Nicolas Sarkozy. Spekulasi yang pertama adalah Prancis berhasil meningkatkan pengaruhnya dalam struktur NATO<sup>57</sup>. EU CSDP juga akan mendapatkan porsi yang lebih dalam pembagian tugas dalam NATO. Hal tersebut merupakan strategi yang disebut dengan *'superpower EU grand strategy'*<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> Ibid., 33.

<sup>57</sup> Ibid., 36.

<sup>58</sup> *'Superpower EU Grand Strategy'* bisa juga dikatakan sebagai kepentingan tradisional dari Prancis. Kepentingan tersebut berhubungan dengan keinginan Prancis untuk menjadikan Eropa dalam area pengaruhnya. Nicolas Sarkozy yang melakukan reintegrasi dalam NATO salah satu



Kemungkinan kedua yang muncul akibat dari reintegrasi Prancis dalam NATO adalah semakin kuatnya posisi AS sebagai hegemon<sup>59</sup>. Prancis bisa menjadi aktor biasa yang mengekor AS. Hal tersebut membuat EU CSDP sebagai kebijakan dan kerjasama yang tidak relevan lagi<sup>60</sup>. Kemungkinan ketiga yang muncul akibat reintegrasi Prancis dalam NATO adalah berubahnya NATO menjadi pasar yang menyediakan kemampuan dan kapabilitas militer<sup>61</sup>. Kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO merupakan langkah pragmatis dari Nicolas Sarkozy untuk mendapatkan kepentingan keamanan dan pertahanan<sup>62</sup>. Skenario keempat yang mungkin terjadi adalah Eropanisasi dari NATO<sup>63</sup>. Prancis dalam hal ini berperan sebagai inisiator yang mendorong Eropanisasi dari NATO. Reintegrasi Prancis dalam NATO semakin memperkuat suara Uni Eropa dalam pengambilan keputusan dalam NATO.

---

tujuannya adalah untuk memajukan kemampuan *hard politic* Eropa melalui EU CSDP. Karena dengan masuknya Prancis dalam akan memperkuat posisi Uni Eropa dalam NATO. Prancis yang merupakan negara inisiator dan pendukung perkembangan EU CSDP berharap bahwa dengan masuknya Prancis dalam NATO akan meningkatkan perkembangan dari EU CSDP. Secara perlahan, Uni Eropa akan menjadi kekuatan internasional yang mampu menjadi pemandang dari AS.

<sup>59</sup> Irondelle dan Merand, Op.Cit., 37-38.

<sup>60</sup> Reintegrasi Prancis dalam NATO bisa saja membuat Prancis menjadi salah satu negara yang mengekor pada AS. Argumen tersebut muncul mengingat sekarang ini kondisi perekonomian di Eropa yang sedang sulit. Kondisi yang sedemikian rupa membuat banyak negara menerapkan strategi *free riding* dalam NATO untuk menekan anggaran pertahanan dan keamanan. EU CSDP sebagai kerjasama pertahanan dan keamanan Eropa akan jatuh dalam kendali NATO. Apabila hal tersebut terjadi, fungsi dari EU CSDP tak lebih dari kerjasama keamanan sipil saja.

<sup>61</sup> Irondelle dan Merand, Op.Cit., 38-39.

<sup>62</sup> Prancis menggunakan NATO maupun EU CSDP sebagai dua aktor komplementer yang akan memenuhi kepentingan nasionalnya. Hal tersebut lah yang disebut sebagai pragmatisme dari Prancis. Selama NATO masih relevan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya maka Prancis berfokus kepada NATO. Demikian juga ketika EU CSDP lebih relevan untuk mencapai kepentingan nasional dari Prancis, maka Prancis akan lebih fokus kepada kinerja dari EU CSDP. Sekarang ini, Prancis melihat baik NATO dan EU CSDP merupakan dua aktor yang sama-sama penting. Oleh karena itu, Nicolas Sarkozy sering kali menyebutkan dalam pidatonya bahwa NATO dan EU CSDP adalah dua kebijakan yang komplementer. Hal tersebut dikarenakan Prancis masih mempunyai kepentingan dalam dua bentuk kerjasama tersebut.

<sup>63</sup> Irondelle dan Merand, Op.Cit., 39-40.



Dari keempat kemungkinan yang mungkin muncul sebagai implikasi dari kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO, skenario yang keempat merupakan tujuan yang diharapkan oleh Nicolas Sarkozy. Jika hal tersebut berhasil terlaksana maka pengaruh Prancis semakin besar di Eropa. Selain itu, Prancis sampai dengan sekarang ini masih menjadi pendorong perkembangan EU CSDP.

Kebijakan pertahanan dan keamanan Prancis pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy bukan saja untuk mengejar kepentingan nasional dari Prancis. Tetapi, Nicolas Sarkozy juga ingin mendapatkan dukungan dari opini publik. Kebijakan reintegrasi dalam NATO pada awalnya mendapatkan banyak penolakan dari opini publik Prancis. Hal tersebut tak lepas dari masih adanya Gaullisme dalam masyarakat Prancis. Langkah yang dilakukan oleh Nicolas Sarkozy untuk mendapatkan dukungan dari opini publik adalah dengan mengeluarkan kebijakan stimulan atau *appeal* dari kebijakan reintegrasi dalam NATO. Kebijakan stimulan tersebut adalah kebijakan memperkuat struktur EU CSDP. EU CSDP lahir dan berkembang sampai dengan sekarang ini merupakan hasil kerja dari pemerintahan Prancis semenjak tahun 1990-an. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa publik Prancis stabil dalam mendukung kebijakan tersebut karena sejalan dengan prinsip Gaullisme.

Brandice Canes-Wrone dalam bukunya yang berjudul *'Who Leads Whom? President, Policy and Public Opinion'* menyebutkan bahwa ketika seorang presiden atau pembuat keputusan dihadapkan kepada penolakan dari opini publik terhadap kebijakan yang dibuatnya maka dia akan mengeluarkan kebijakan atau

masalah lain untuk mengalihkan secara persuasif opini publik<sup>64</sup>. Dua kebijakan pertahanan dan keamanan yang dikeluarkan oleh Nicolas Sarkozy pada masa pemerintahannya yaitu kebijakan reintegrasi dalam NATO dan kebijakan memperkuat EU CSDP merupakan suatu cara untuk memenangkan dukungan opini publik.

Ketika Nicolas Sarkozy dihadapkan kepada pilihan untuk bertindak pragmatis dengan melakukan reintegrasi dalam NATO, maka Presiden Prancis tersebut harus mengeluarkan kebijakan stimulan untuk mengalihkan secara persuasif opini publik. Kebijakan memperkuat EU CSDP yang terangkum juga dalam Perjanjian Lisbon 2008 merupakan kebijakan stimulan untuk mengubah opini publik. Opini publik merupakan subjek dalam politik yang bergerak secara tidak teratur dan mengambang. Oleh karena itu, strategi yang tepat dari presiden atau pembuat keputusan untuk meyakinkan opini publik sangat diperlukan dalam menghadapi situasi dan kondisi sedemikian rupa. Hal tersebut merupakan salah satu proses Nicolas Sarkozy dalam meyakinkan opini publik terhadap langkah kebijakan pertahanan dan keamanan yang ditempuhnya. Pada bagian berikutnya akan dibahas mengenai penggunaan konsep pemasaran politik oleh Nicolas Sarkozy dalam mengubah opini publik Prancis terhadap kebijakan reintegrasi dalam NATO.

---

<sup>64</sup> Brandice Canes-Wrone. 2006. *Who Leads Whom? President, Policy and Public Opinion*. Chicago: Chicago University Press, 20.

## **BAB IV**

### **SARKOZY, MEDIA DAN KEBIJAKAN REINTEGRASI DALAM NATO**

Bab keempat dalam penelitian ini membahas mengenai publikasi kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO. Konsep pemasaran politik digunakan untuk menggambarkan dua variabel utama dalam penelitian ini yaitu Nicolas Sarkozy dan opini publik. Nicolas Sarkozy digambarkan sebagai seorang produsen yang mengenalkan produknya. Sementara itu, opini publik adalah konsumen yang diperkenalkan kepada produk tersebut. Produk adalah gambaran dan justifikasi dari kebijakan reintegrasi Prancis ke dalam NATO.

Alat yang digunakan untuk melakukan pemasaran tersebut adalah media. Opini publik merupakan subjek yang mengambang seperti tersebut di atas. Mereka membutuhkan informasi untuk meyakinkan penilaian mereka terhadap suatu masalah atau isu. Media merupakan penyedia informasi yang paling dekat dan mudah diakses oleh opini publik. Oleh karena itu, bab keempat ini juga membahas mengenai peran media dalam membentuk opini publik Prancis, khususnya terhadap NATO.

#### **IV.1. Peran Media dalam Sosial Politik**

Media, opini publik dan politik merupakan tiga subjek yang mempunyai hubungan yang dekat dalam kehidupan sehari-hari. Media merupakan sumber informasi yang paling dekat dan mudah diakses oleh masyarakat. Media bisa

menjadi alat bagi pemerintah atau politisi untuk memanipulasi informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Meskipun kebebasan media merupakan salah satu bagian dari demokrasi, tetapi praktek manipulasi informasi dengan tujuan politis masih banyak ditemukan di banyak negara demokratis. Pihak-pihak yang berusaha memberikan informasi secara terus menerus bahkan memanipulasi informasi tersebut kepada masyarakat mempunyai tujuan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat akan kegiatan yang mereka lakukan<sup>1</sup>. Teknologi yang berkembang dari masa ke masa memberikan dampak tersendiri kepada media yang ada. Apabila dahulu informasi hanya bisa didapatkan melalui koran dan majalah, sekarang ini terdapat internet yang mempermudah media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Keberadaan media massa dan kebebasan dari media massa tersebut dalam menyampaikan berita dan informasi kepada masyarakat memang mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dari media massa sudah tersebut di atas yakni sering kali media dijadikan alat untuk mencapai kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Kepentingan politik ingin dicapai oleh para politisi dengan memanfaatkan media. Sementara itu, kepentingan ekonomi diperoleh pengelola dan pemilik media dengan memenuhi kebutuhan dari mereka yang memanipulasi media. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa media memiliki banyak kelemahan, tetapi media juga mempunyai kelebihan yakni memberikan informasi. Karena tidak semua media bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu.

---

<sup>1</sup> Stratford-Wright, K.P.. n.d. *Public Opinion, the Media, Informations, Propaganda, and Media Operations*. Terdapat dalam <http://ics-www.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&folder=66&paper=2249>, diakses pada [10 Mei 2012].

Kepemilikan atas perusahaan media dipegang atas dua pihak yakni swasta dan pemerintah. Media massa atas kepemilikan pemerintah sangat berpotensi dimanipulasi oleh politisi.

Informasi yang diperoleh publik melalui media merupakan pembentuk pemikiran dan permasalahan yang dipikirkan oleh opini publik. Hal tersebut merupakan fungsi media sebagai *agenda-setter* dalam opini publik<sup>2</sup>. Peran media dalam kehidupan sosial politik adalah mengkonstruksi apa yang dipikirkan oleh opini publik. Hal tersebut dikarenakan komunikasi yang disediakan oleh media massa adalah komunikasi satu arah. Pembaca atau konsumen dari media massa hanya menerima informasi atau berita dari media. Komunikasi satu arah yang menyebabkan opini publik bisa dikonstruksi oleh media. Opini publik lebih tidak mengetahui mengenai permasalahan luar negeri dari pada dalam negeri negaranya. Hal tersebut membuat sering kali pemerintah menggunakan media untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada publik baik hal tersebut positif maupun negatif.

Kerjasama antara politisi dengan media mengkonstruksi pikiran publik adalah hal yang melanggar etika jurnalistik. Media massa seharusnya bersifat objektif dalam menyampaikan berita atau tayangan. Karena hal tersebut merupakan dasar etika jurnalistik<sup>3</sup>. Kandidat presiden dalam pemilihan atau pemerintah yang sedang memimpin sering menggunakan media sebagai alat untuk

---

<sup>2</sup> Stuart N. Soroka, 2003. *Media, Public Opinion and Foreign Policy*. The President and The Fellows of Harvard College., 29.

<sup>3</sup> Scott London. 1993. *How the Media Frames Political Issues*. Terdapat dalam <http://www.scottlondon.com/reports/frames.html>, diakses pada [15 Mei 2012].



mencapai kepentingan masing-masing. Media meliput berbagai berita dan isu yang diinginkan oleh kandidat presiden atau pemerintah yang sedang memimpin. Hal ini membuat publik kehilangan proses demokrasi. Karena publik seharusnya juga aktif dalam memberikan saran dan kritik mengenai suatu isu atau permasalahan dalam negara.

Pemberitaan di media yang sekarang ini sulit untuk bisa ditemukan objektivitasnya tak lepas dari adanya kepentingan dalam berita yang dimuat. Kepentingan tersebut adalah antara politisi dengan jurnalis atau reporter. Dua pihak tersebut mempunyai hubungan mutualisme<sup>4</sup>. Politisi bekerja sama dengan jurnalis atau reporter untuk mendapatkan pencitraan yang baik di masyarakat. Sementara itu, jurnalis atau reporter bekerja sama dengan politisi untuk mendapatkan berita yang bagus dan bisa meningkatkan karir mereka.

Sekarang ini, bukan hanya iklan komersil produk dan jasa saja yang dipasang di media baik elektronik maupun cetak. Tetapi, iklan politik juga menjadi komersil dimuat di media. Hal tersebut terutama terjadi pada masa kampanye menuju pemilihan umum. Partai politik dan calon presiden membuat berbagai macam slogan dan iklan politik yang menarik<sup>5</sup>. Bahkan, mereka dengan senang menunjukkan kehidupan pribadi mereka kepada publik. Hal pribadi tersebut tentu yang baik untuk mendapatkan pencitraan yang baik.

---

<sup>4</sup> Willian J. Willis. 2007. *Come Closer? The Ambiguous Relationship between Media and Politics*. Dalam wawancara oleh Natalie Serfozo. Terdapat dalam [http://asjournal.zusas.uni-halle.de/op/wss2007\\_1/45.html](http://asjournal.zusas.uni-halle.de/op/wss2007_1/45.html), diakses pada [16 Mei 2012].

<sup>5</sup> "Les Medias, Un Quatrieme Pouvoir?". n.d. Terdapat dalam <http://media-et-politique.e-monsite.com/pages/les-medias-un-quatrieme-pouvoir.html>, diakses pada [15 Mei 2012].

Struktur organisasi media terdiri dari tiga bagian utama yakni reporter, editor dan pemilik. Ketiga bagian tersebut mempunyai hubungan berantai dan kepentingan masing-masing. Reporter bertugas meliput berita dan membuat berita<sup>6</sup>. Reporter akan mencapai targetnya apabila berita yang didapatkan dimuat di media dimana dia bekerja. Editor adalah orang yang menentukan suatu berita dimuat atau tidak dalam media. Sementara itu, pemilik adalah jabatan tertinggi dalam struktur yang menentukan nasib dari editor dan reporter. Tugas dari pemilik adalah memastikan media dibaca oleh publik dan mendapatkan keuntungan. Ketiga aktor media tersebut disebut juga sebagai elite media atau orang yang menentukan isi dari berita.

Politisi, kandidat presiden atau aktor politik lain sering kali mendekati elite media dengan tujuan mendapatkan kontrol atas media. Aktor politik yang menguasai media bisa mempunyai kontrol atas opini publik.

#### **IV.2. Karakteristik Media Prancis**

Sekitar seratus media massa beredar di Prancis setiap harinya<sup>7</sup>. Sebagian besar dari media tersebut adalah milik swasta. Selain itu, di Prancis juga terdapat media lain seperti radio dan stasiun televisi yang beberapa diantaranya sudah menayangkan siarannya di luar negeri. Beberapa media massa yang paling berpengaruh di Prancis antara lain adalah *Le Figaro*, *Le Monde* dan *Le Parisien*<sup>8</sup>. Publik Prancis pada umumnya sangat bergantung kepada media-media tersebut

<sup>6</sup> Ibid., 135.

<sup>7</sup> “France Country Profile “. 2012. Terdapat dalam [http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country\\_profiles/998481.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/998481.stm), diakses pada [18 Mei 2012].

<sup>8</sup> “France Press, Media, TV, Radio, Newspaper”. 2012. Terdapat dalam <http://www.pressreference.com/Fa-Gu/France.html>, diakses pada [18 Mei 2012].

dalam mendapatkan informasi mengenai permasalahan dan isu yang sedang berkembang. Hal tersebut membuat media di Prancis tidak lepas dari pengaruh politisi. Politisi Prancis pasca Perang Dunia II sudah menggunakan media sebagai alat politik bagi mereka<sup>9</sup>.

Hubungan antara media dengan politik di Prancis yang erat sesuai dengan penjelasan pada sub bab sebelumnya. Media dijadikan sebagai alat bagi politisi untuk mempromosikan dirinya kepada publik dalam pemilihan umum. Media juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengubah kepercayaan publik akan suatu kebijakan atau permasalahan tertentu. Media di Prancis terdiversifikasi berdasarkan kepada ideologi, misalkan *Lettre de la Nation* dan *L'Humanite* yang berhaluan sosialis serta *Le Monde* yang berhaluan tengah kiri<sup>10</sup>. Fakta tersebut menunjukkan bahwa memang hubungan antara media dengan politik di Prancis erat. Fakta tersebut juga menunjukkan bahwa objektivitas berita yang dimuat dalam media Prancis kecil persentasenya. Jurnalistik mempunyai etika tersendiri dan salah satunya adalah objektivitas. Media yang mempunyai orientasi politik tertentu jelas tidak menunjukkan etika jurnalistik.

Berikut ini adalah beberapa afiliasi politik dari media di Prancis:

#### **Tabel IV.1. Afiliasi Politik Media Massa Prancis**

<sup>9</sup> Giorgios Terzis, 2008. *European Media Governance: National and Regional Dimensions*. Bristol: Intellect Books, terdapat dalam [http://www.intellectbooks.co.uk/books/view-Book\\_id=4601/](http://www.intellectbooks.co.uk/books/view-Book_id=4601/), 21.

<sup>10</sup> "France Press, Media, TV, Radio, Newspaper" ., Op. Cit.

Media	Afiliasi Politik
Le Monde	Kiri tengah
TF 1	Nasionalis (kanan)
Marianne	Kiri tengah
Le Figaro	Nasionalis (kanan)
Lettre de la Nation	Sosialis (kiri)
L'Humanite	Sosialis (kiri)
Valeurs acutelles	Nasionalis (kanan)

Sumber diolah dari “*Le rôle des médias face aux citoyens et leurs opinions politiques. - Les médias aident-ils les citoyens à se forger une opinion politique - Le rôle d'internet*”. n.d. Terdapat dalam <http://medias-politique.e-monsite.com/pages/le-role-des-medias-face-aux-citoyens-et-leurs-opinions-politiques.html>, diakses pada [15 Mei 2012].

Model media yang ada di Prancis disebut dengan *polarised pluralistic*<sup>11</sup>. Model tersebut mempunyai karakteristik media terlalu banyak ikut campur dalam urusan politik. Media Prancis yang mempunyai afiliasi politik seperti tersebut di atas adalah bukti dari model *polarised pluralistic*. Media yang mempunyai afiliasi politik tertentu kurang mempunyai objektivitas dalam memuat suatu berita. Reporter, editor dan pemilik media tidak mampu berperan sebagai pihak ketiga atau pihak yang tidak memihak. Afiliasi politik media Prancis membuat berita yang mereka sampaikan kepada publik diinterpretasikan berdasarkan kepada afiliasi politik masing-masing.

---

<sup>11</sup> Terzis, Op. Cit., 19.

Hubungan yang erat antara politik dengan media di Prancis juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terhadap media. Pemerintah Prancis menerapkan kebijakan memberikan subsidi kepada semua media dalam operasionalnya<sup>12</sup>. Pemerintah Prancis bukan hanya memberikan subsidi operasional saja, tetapi juga memberikan subsidi pajak kepada reporter. Dari awal, pemerintah sudah menjalin hubungan mutualisme dengan media. Hal tersebut tidak mengherankan jika media di Prancis kurang memiliki objektivitas dalam praktek jurnalistiknya.

Tahun 1960-an televisi di Prancis untuk pertama kalinya mulai ikut campur dalam urusan politik<sup>13</sup>. Hal tersebut ditandai dengan mulai diadakannya acara televisi dengan tajuk debat politik antar kandidat presiden Prancis. Pada tahun 1975, debat politik antara kandidat oleh stasiun televisi di Prancis yaitu antar Valery D'Estaning melawan Francois Mitterand. Kurun waktu tersebut di atas merupakan tanda dari komersialisasi dari politik dalam media. Politik mulai dikemas secara menarik atau komersil untuk menarik perhatian dan dukungan dari publik. Hal tersebut bukan hanya terjadi ketika pemilihan umum akan berlangsung, tetapi juga ketika sedang menjabat dalam pemerintahan.

Pasca perang dunia merupakan momentum media menjadi kekuatan baru dalam dunia politik baik lokal maupun internasional. Pada tahun 1940-an media yang ada pada saat itu mempunyai konsentrasi pada kekuatan dari aktor-aktor

---

<sup>12</sup> Benson, Rodney dan Hallin, Daniel C. 2007. *How States, Market and Globalization Shape News: The French and US National Press, 1965-97*. Sage Publications, terdapat dalam <http://ejc.sagepub.com/cgi/content/abstract/22/1/27>, (27-48), 29.

<sup>13</sup> "Les Medias, Un Quatrieme Pouvoir?". n.d. Terdapat dalam <http://media-et-politique.e-monsite.com/pages/les-medias-un-quatrieme-pouvoir.html>, diakses pada [15 Mei 2012].



politik pada waktu itu. Pada tahun 1960-an terjadi penurunan pengaruh media terhadap publik. Kemudian sekarang ini, media mempunyai legitimasi dan pengaruh yang besar terhadap publik. Hal tersebut merupakan fase dari perkembangan media dalam pengaruhnya terhadap publik<sup>14</sup>. Media menjadi kekuatan politik baru sekarang ini yang didukung dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin mempermudah publik mengakses berita dan informasi yang disediakan oleh media.

Media Prancis mempunyai kualitas yang tinggi karena selain bermuatan politik, media Prancis juga edukatif terhadap pembacanya<sup>15</sup>. Pembaca atau konsumen dari media di Prancis beragam dari remaja sampai dengan orang tua. Tetapi, konsumen berita terbanyak adalah pada usia produktif yaitu di bawah 35 tahun dengan prosentase 61%<sup>16</sup>. Perkembangan teknologi dan informasi seperti internet membuat konsumen berita di Prancis meningkat drastis pada tahun 2000-an. Beberapa media yang sering dikunjungi oleh pembaca secara *online* antara lain adalah *Les Echos*, *Group Nouvelle Observateur*, *Le Monde Diplomatique*.

Hubungan antara media dengan politik di Prancis bersifat simbiotik dan rumit. Beberapa faktor menyebabkan hal tersebut terjadi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah subsidi pemerintah terhadap media, strategi politisi dalam memanfaatkan media sebagai kekuatan politik mereka dan media yang

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> “*France Press, Media, TV, Radio, Newspaper* “.2012. Terdapat dalam <http://www.pressreference.com/Fa-Gu/France.html>, diakses pada [18 Mei 2012].

<sup>16</sup> Ibid.

mempunyai afiliasi politik tertentu. Fakta tersebut membuat jurnalisme di Prancis seperti terjangkit suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan.

### IV.3. Pengaruh Nicolas Sarkozy terhadap Media di Prancis

Nicolas Sarkozy adalah satu-satunya presiden Prancis yang mempunyai representasi diri yang baik sampai dengan sekarang ini<sup>17</sup>. Hal tersebut membuat media senang karena bisa mendapatkan banyak berita dari sifat presidennya tersebut. *Hypervisibility* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan Nicolas Sarkozy pada awal pemerintahannya pada tahun 2007. Setiap hari pada masa awal pemerintahannya Nicolas Sarkozy selalu muncul di media. Pemerintah Prancis dengan media sudah lama menjalin hubungan kerjasama dan salah satunya adalah subsidi pemerintah terhadap media. Segala bentuk kegiatan kepresidenan seperti konferensi pers, wawancara televisi dan pertemuan internasional pasti akan ditayangkan oleh media Prancis<sup>18</sup>.

Nicolas Sarkozy berbeda dari presiden Prancis Republik ke-V lainnya dalam berurusan dengan media. Nicolas Sarkozy adalah presiden yang paling sering muncul di televisi. Pada awal pemerintahannya pada Mei-Agustus 2007 terhitung sebanyak 224 kali Nicolas Sarkozy muncul dalam tayangan berita televisi<sup>19</sup>. Hal tersebut berbeda jauh dengan penampilan Jacques Chirac di media televisi pada masa pemerintahannya yaitu sebanyak 75 kali pada tahun 2002.

<sup>17</sup>Christian Delporte. 2012. *Sarkozy and The Media, Contemporary French and Francophone Studies*. Routledge, 16:3, h. 299-310, terdapat dalam <http://dx.doi.org/10.1080/17409292.2012.675668>, 299.

<sup>18</sup>Raymond Kuhn, 2010. "*Les Medias, C'est Moi*", *Presidential Media Management in Sarkozy's France*. London: Queen Mary University, h. 1-16., 2.

<sup>19</sup>Delporte, Op. Cit., 302.

Nicolas Sarkozy mengetahui bahwa media merupakan alat yang bisa digunakan untuk memenangkan opini publik Prancis. Strategi yang digunakan Nicolas Sarkozy untuk menguasai opini publik adalah dengan menguasai media. Reporter veteran yang bekerja di Istana Elysee menyatakan bahwa Nicolas Sarkozy adalah sumber berita yang baik, tetapi ketika seseorang tidak sepeham dengannya maka fatal akibatnya<sup>20</sup>. Reporter tersebut bisa berkata demikian karena Sarkozy sudah mempunyai kontrol atas media. Nicolas Sarkozy bukan seperti Sylvio Berlusconi yang mempunyai kepemilikan atas media berpengaruh di Italia. Tetapi, teman dari Sarkozy mempunyai kepemilikan atas media berpengaruh di Prancis.

Beberapa teman Nicolas Sarkozy yang mempunyai kepemilikan atas media berpengaruh di Prancis antara lain adalah:

**Tabel IV.2. Kepemilikan Media Massa di Prancis**

<b>Pemilik</b>	<b>Media Massa</b>
<b>Arnaud Legardere</b>	<i>Paris Match, Elle, Journal du Dimanche.</i>
<b>Martin Bouygues</b>	TF1, dan <i>Eurosport</i>
<b>Bernard Arnault</b>	LVMH, <i>LeTribune, Investir, Les Echos</i> dan <i>Radio Classique</i>
<b>Serge Dassault</b>	<i>Le Figaro.</i>
<b>Francois Pinault</b>	<i>Le Point</i>

<sup>20</sup> Nils Klawitter dan Stefan Simons. 2008. *Sarkozy Moves to Control French Media*. Terdapat dalam <http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,565062,00.html>, diakses pada [20 Mei 2012].

Sumber diolah dari Anon. 2010. *How Nicolas Sarkozy Influence The French Media*. Terdapat dalam <http://www.guardian.co.uk/media/2010/jul/05/nicolas-sarkozy-french-media>, diakses pada [21 Mei 2012].

Media-media yang dikuasai lima konglomerat tersebut di atas merupakan media yang berpengaruh di Prancis. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pada masa pemerintahannya Nicolas Sarkozy membangun sebuah sistem monarki dalam media. Nicolas Sarkozy mempunyai jaringan media yang luas. Hal tersebut membawa keuntungan pada Nicolas Sarkozy karena Sarkozy bisa memanfaatkan media sebagai kekuatan untuk memengaruhi opini publik.

Nicolas Sarkozy yang mempunyai kedekatan dengan pemilik-pemilik dari media berpengaruh di Prancis secara tidak langsung membuat dirinya mempunyai kontrol atas reporter. Nicolas Sarkozy bisa mengancam dan menghalangi reporter yang tidak menuruti keinginannya atau ingin menjatuhkan citranya. Nicolas Sarkozy selalu menerapkan sikap “*hard cop and soft cop*” dalam setiap interaksinya dengan reporter atau koresponden<sup>21</sup>. Strategi tersebut efektif memaksa reporter atau editor untuk memuat berita yang menunjang pencitraan baik dari Nicolas Sarkozy.

Strategi lain yang dilakukan Nicolas Sarkozy untuk menguasai media di Prancis adalah dengan membuat kebijakan media. Pada tahun 2009, Nicolas Sarkozy menyatakan bahwa presiden mempunyai hak untuk menentukan kepala dari stasiun penyiaran nasional Prancis yaitu *France Televisions* dan *Radio*

---

<sup>21</sup> Raymond Kuhn, 2010. “*Les Medias, C’est Moi*”, *Presidential Media Management in Sarkozy’s France*. London: Queen Mary University, (1-16), 5.

*France*<sup>22</sup>. Nicolas Sarkozy menyatakan bahwa kontrol presiden atas kebutuhan dan sarana publik juga berlaku pada media penyiaran publik Prancis. Kebijakan tersebut semakin mempermudah Nicolas Sarkozy memanipulasi muatan media untuk kepentingan politik.

Nicolas Sarkozy pernah ikut campur dalam penjualan salah satu media cetak harian Prancis yaitu *Le Monde*<sup>23</sup>. Nicolas Sarkozy melakukan hal tersebut karena merasa takut mengenai pemberitaan media tersebut yang akan mengganggu pemerintahannya. Kemudian, pada waktu terjadi protes mengenai kebijakan memperpanjang usia pensiun, dua reporter diserang oleh polisi anti huru-hara<sup>24</sup>. Nicolas Sarkozy bukan hanya menggunakan strategi halus dalam mendapatkan kontrol atas media, tetapi juga menggunakan cara keras seperti dua contoh di atas.

Nicolas Sarkozy menjalani kehidupannya seperti seorang selebritis. Nicolas Sarkozy tidak keberatan jika media meliput kehidupannya. Selama lebih dari 30 tahun Sarkozy memang berusaha membangun citra politiknya dengan menggunakan media<sup>25</sup>. Kehidupan pribadi Nicolas Sarkozy dari perceraian dengan Cecilia sampai dengan pernikahan dengan istri baru, Carla Bruni, menjadi pemberitaan di berbagai media di Prancis. Hal tersebut merupakan strategi dari Nicolas Sarkozy untuk memenangkan pemilihan umum pada tahun

---

<sup>22</sup> Ibid., 4.

<sup>23</sup> Emma Heald. 2010. *Does Sarkozy Exert too Much Influence Over The French Media*. Terdapat dalam <http://www.editorsweblog.org/2010/07/05/does-sarkozy-exert-too-much-influence-over-the-french-media>, diakses pada [21 Mei 2012].

<sup>24</sup> "Sarkozy and The Media". 2011. Terdapat dalam <http://pennpoliticalreview.org/2011/01/sarkozy-and-the-media/>, diakses pada [21 Mei 2012].

<sup>25</sup> "Engaging With The Media-Sarkozy Style". 2010. Terdapat dalam <http://news.bbc.co.uk/2/hi/8826485.stm#blq-main>, diakses pada [21 Mei 2012].



2007<sup>26</sup>. Sebagian besar dari pemilih pada pemilihan umum presiden Prancis pada tahun 2007 adalah wanita. Strategi Nicolas Sarkozy yaitu membangun citra di media seperti selebritis terbukti menjadi salah satu faktor keberhasilan menarik simpati pemilih dengan terpilihnya Sarkozy sebagai presiden Prancis 2007-2012.

Tetapi, tindakan-tindakan yang dilakukan Nicolas Sarkozy tersebut di atas tidak membuat jurnalis dan reporter menyukai Sarkozy. Sebagian besar dari mereka bahkan membenci Nicolas Sarkozy karena sikap sewenang-wenangnya terhadap media dan jurnalis<sup>27</sup>. Pada tahun 2009, gelombang balas dendam dari para jurnalis datang kepada Nicolas Sarkozy. Banyak jurnalis bertindak independen dengan membuat berita yang menjatuhkan citra dari presiden. Beberapa berita tersebut antara lain adalah nepotisme, Jean Sarkozy diberi jabatan dalam manajemen bisnis dan keamanan Prancis; *The Woerth-Bettencourt Affairs* pada tahun 2010; Pengaturan penjualan harian *Le Monde*; dan masih banyak lagi. Gelombang pemberitaan dari media yang menjatuhkan citra Nicolas Sarkozy terjadi sampai dengan 2011. Hal tersebut membuat popularitas dari Nicolas Sarkozy turun 20% pada tahun 2011.

#### **IV.4. Publikasi Kebijakan Reintegrasi dalam NATO dalam Media**

Media merupakan kekuatan pendukung dari seorang politisi untuk bisa menguasai opini publik. Nicolas Sarkozy yang mempunyai kontrol atas media pada masa pemerintahannya mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan

---

<sup>26</sup> Kuhn, Op. Cit., 8.

<sup>27</sup> Christian Delporte. 2012. *Sarkozy and The Media, Contemporary French and Francophone Studies*. Routledge, 16:3, h. 299-310, terdapat dalam <http://dx.doi.org/10.1080/17409292.2012.675668>, 301.

nilai dan kepercayaan dalam opini publik Prancis. Kebijakan tersebut adalah kebijakan reintegrasi Prancis ke dalam NATO. Sebelum kebijakan tersebut ditetapkan pada tanggal 3-4 April 2009, opini publik Prancis yang menolak kebijakan tersebut dengan prosentase 46% tahun 2008<sup>28</sup>. Pada tahun 2009, opini publik berubah menjadi mendukung kebijakan tersebut dengan prosentase 52%<sup>29</sup>. Nicolas Sarkozy adalah salah satu faktor di balik perubahan opini publik terhadap NATO tersebut.

Konsumen media massa di Prancis meningkat secara drastis pada tahun 2000-an terutama konsumen media massa *online*<sup>30</sup>. Hal tersebut didukung dengan adanya peningkatan jumlah pengguna komputer dan media elektronik lain yang menunjang akses terhadap media massa *online* di Prancis. Beberapa media massa *online* yang paling sering dikunjungi antara lain adalah *Les Echos*, *Le Nouvel Observateur*, dan *Le Monde Diplomatique*<sup>31</sup>. Tiga media massa *online* tersebut dijadikan indikator dalam penelitian ini. Berikut adalah analisa dari media massa *online* tersebut di atas yang memuat berita mengenai pemasaran politik Nicolas Sarkozy dalam kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO:

#### **Tabel IV.2. *Les Echos***

<sup>28</sup> Pew Research Center. 2011. *Pew Global Attitudes Project: Support for War in Afghanistan*". Terdapat dalam

<http://www.pewglobal.org/database/?indicator=8&survey=8&response=Favor&mode=chart>, diakses pada [2 Mei 2012]., prosentase tersebut didapatkan dari dukungan masyarakat Prancis terhadap operasi militer NATO di Afghanistan yang diikuti oleh Prancis.

<sup>29</sup> Lucy Gill, 2009. *French Split Over Rejoining NATO*. Terdapat dalam <http://news.bbc.co.uk/2/hi/7937126.stm>, diakses pada [29 April 2012].

<sup>30</sup> "France Press, Media, TV, Radio, Newspaper". 2012. Terdapat dalam <http://www.pressreference.com/Fa-Gu/France.html>, diakses pada [18 Mei 2012].

<sup>31</sup> Ibid.

No.	Edisi	Judul Berita
1	06/04/2009	<i>L'Amerique Parie sur le Partenariat avec L'Europe</i>
2	03/04/2009	<i>Le Sommet de l'OTAN, La France Reprend tout sa Place dans L'Alliance</i>
3	30/03/2009	<i>L'OTAN Pourquoi Faire?</i>
4	17/03/2009	<i>La Reintegration dans l'OTAN en Debat a l'Assemblee Nationale</i>
5	12/03/2009	<i>Le Retour de la France dan l'OTAN</i>
6	12/03/2009	<i>La Condition Posee d'un Renforcement de l'Europe de la Defence n'a pas ete Remplie</i>
7	12/03/2009	<i>Sarkozy Justifie la Reintegration de la France dans l'OTAN</i>
8	11/03/2009	<i>OTAN: Sarkozy Veut Convaincre du bien Fonde de la Reintegration</i>
9	11/03/2009	<i>La France Restera Independante</i>
12	18/02/2009	<i>OTAN: l'Executif Essaie de Convaincre les Deputes UMP</i>
11	12/02/2009	<i>Polemique sur l'Integration de la France a l'OTAN</i>
10	09/02/2009	<i>Merkel et Sarkozy Jouant l'Unite Franco-Allemand a Munich</i>
13	01/09/2008	<i>Les Paris Internationaux du President Sarkozy</i>
14	24/06/2008	<i>Le Grande-Bretande Reste Sceptique</i>
15	17/06/2008	<i>Des Ambitious Europeennes Fragilisees Parle &lt;&lt;non&gt;&gt; Irlandais</i>
19	02/04/2008	<i>Un pas de plus Vers la Totale Reintegration de la France</i>
18	18/03/2008	<i>La France, Aiguillon l'OTAN</i>
17	10/01/2008	<i>L'Ambition Europeenne de Sarkozy a l'e Preure de Realites</i>
16	02/11/2007	<i>Le Balancier Franco-Americain</i>
20	2009	<i>Sarkozy Confirme la Probable reintegration Totale de la France a l'OTAN</i>

Sumber diolah dari Les Echos France. "Reserchez <<retour dans l'OTAN>>". <http://recherche.lesechos.fr/recherche.php?ob=&exec=1&texte=retour+dans+%2727totan&type=tous&dans=article&source=toutes&rubrique=toutes&motscler=tous&dateSelect=4&jour=26&mois=05&annee=2007&jourf=26&moisf=05&anneef=2010&nbParPage=20> [23-26 Mei 2012].

**Tabel IV.3. Le Monde Diplomatique**

No.	Edisi	Judul Berita
1	20/06/2008	<i>Le Livre Blanc sur la defence et la Securite Nationale</i>
2	29/08/2008	<i>Nicolas Sarkozy et les &lt;&lt;ruptures&gt;&gt; de la Politique Estragere</i>
3	n.d./3/2009	<i>A Quoi Sert l'OTAN?</i>
4	13/03/2009	<i>OTAN: Le Retour de la France</i>
5	n.d./4/2009	<i>La fin de Quarante Trois ans d'&lt;&lt;exception&gt;&gt;</i>
6	02/04/2009	<i>Sommet de l'OTAN</i>

Sumber diolah dari Le Monde Diplomatique. “Reserchez <<retour dans l’OTAN>>”.  
<http://www.monde-diplomatique.fr/recherche?s=retour+dans+l%27otan> [23-26 Mei 2012].

**Tabel IV.4. Le Nouvel Observateur**

No.	Edisi	Judul Berita
1	11/10/2007	<i>L'Atlantisme de Sarkozy n'a rien d'Exceptionnel</i>
2	02/04/2008	<i>Sarkozy Va Affirmer son Atlantisme au Sommet de l'OTAN</i>
3	03/04/2008	<i>OTAN: la France Pourrait Revenir dans le Commandement Integre en 2009</i>
4	03/04/2008	<i>OTAN: la France Pourrait Faire son Retour en 2009</i>
5	17/06/2008	<i>OTAN: les Etats-Unis Saluent le Retour de la France</i>
6	17/06/2008	<i>Armee: Sarkozy Confirme un Baisse des Efectifs</i>
7	12/03/2009	<i>OTAN: Washington "Ravi" de l'Engagement de Paris</i>
8	12/03/2009	<i>OTAN: l'Assamblee Vote la Confiance au Gouverne</i>
9	15/03/2009	<i>OTAN: la France sera la tete et la Jambes</i>
10	15/03/2009	<i>Sarkozy et l'OTAN: "le moment est venu"</i>
11	18/03/2009	<i>Sans Surprise, l'Assemblee Nationale Vote le Retour de la Franfce au sein de l'OTAN</i>
12	18/03/2009	<i>OTAN: la France Pourrait Controler Norfolk</i>
13	01/04/2009	<i>La France n'a Intregre pas le Comite des Plans Nuclaires</i>
14	03/04/2009	<i>Ouverture du Sommet de l'OTAN</i>

Sumber diolah dari Le Nouvel Observateur. “Reserchez <<retour dans l’OTAN>>”.  
<http://recherche.nouvelobs.com/?q=retour%20dans%20l%27otan&p=38&C=cXVlnkIM0RyZXRvdXIIMkJKYW5zJTJCbcUyNTI3b3RhbiUyNm5yZXN1bHRzJT>



[NEMTAIMjZzdGFydCUzRDM2MCUyNm4lM0RzbHJlZm9udGUtZ2xvYmFsZQ](#) [23-26 Mei 2012].

#### IV.5. Analisis Peran Media sebagai Alat Pemasaran Politik Nicolas Sarkozy

Rangkuman media massa *online* Prancis dalam tabel-tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat banyak judul berita yang memuat pembenaran maupun pengumuman rencana reintegrasi Prancis ke dalam NATO. Konsentrasi berita mengenai kebijakan reintegrasi Prancis ke dalam NATO terjadi pada bulan Februari-Maret tahun 2009. Hal tersebut mengindikasikan titik perputaran opini publik Prancis yang mulai mendukung kebijakan reintegrasi Prancis ke dalam NATO.

Intensitas media massa *online* yang memuat berita mengenai kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO juga menunjukkan bahwa opini publik terpengaruh oleh media tersebut. Publik Prancis pada abad ke-XXI menunjukkan peningkatan konsumen media massa *online*, terutama tiga media massa tersebut di atas<sup>32</sup>. Nicolas Sarkozy juga mempunyai kontrol yang besar atas media di Prancis. Satu media massa *online* tersebut di atas berada di bawah kepemilikan dari teman Nicolas Sarkozy. *Les Echos* berada di bawah kepemilikan dari Serge Dassault<sup>33</sup>. Sementara itu, *Le Monde Diplomatique* yang mempunyai haluan politik kiri sedikit mempublikasikan berita yang memuat pembenaran Nicolas Sarkozy memasukkan Prancis ke dalam NATO. *Le Nouvel Observateur* memuat banyak

<sup>32</sup> “*France Press, Media, TV, Radio, Newspaper*”, Op. Cit.

<sup>33</sup> “*The Transfer of Ownership of The Group Les Echos*”, n.d. Terdapat dalam <http://www.aircountry.info/voyages/the-transfer-ownership-group-les-echos-les-echos-lesechos.php>, diakses pada [26 Mei 2012].



berita mengenai pembenaran Nicolas Sarkozy meskipun berhaluan kiri tengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontrol Nicolas Sarkozy media di Prancis berguna untuk menjalankan pemasaran politik kebijakan reintegrasi Prancis ke dalam NATO.



## BAB V

### KESIMPULAN

Pada bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang opini publik Prancis, *public appeals* Nicolas Sarkozy dan pemasaran politik dari kebijakan reintegrasi Prancis ke dalam NATO. Ketiga bab tersebut menjelaskan bagaimana Nicolas Sarkozy bisa menjadi faktor yang memengaruhi perubahan dalam opini publik Prancis terhadap kebijakan reintegrasi dalam NATO. Berdasarkan temuan data dan analisa peneliti menyimpulkan bahwa Nicolas Sarkozy sebagai presiden memengaruhi pemikiran opini publik untuk mendukung kebijakan reintegrasi Prancis ke dalam NATO dengan dua strategi atau cara yaitu menetapkan kebijakan memperkuat EU CSDP dan mempublikasikan pembenaran kebijakan tersebut dalam media massa.

Pada bab II peneliti menuliskan tentang volatilitas dari opini publik Prancis dalam menilai kebijakan pertahanan dan keamanan Prancis. Kondisi tersebut benar-benar dimengerti oleh Nicolas Sarkozy untuk memetakan preferensi opini publik. Dua strategi yaitu *public appeals* dan pemasaran politik digunakan oleh Nicolas Sarkozy untuk mendapatkan dukungan dari opini publik terhadap rencana kebijakan reintegrasi Prancis ke dalam NATO.

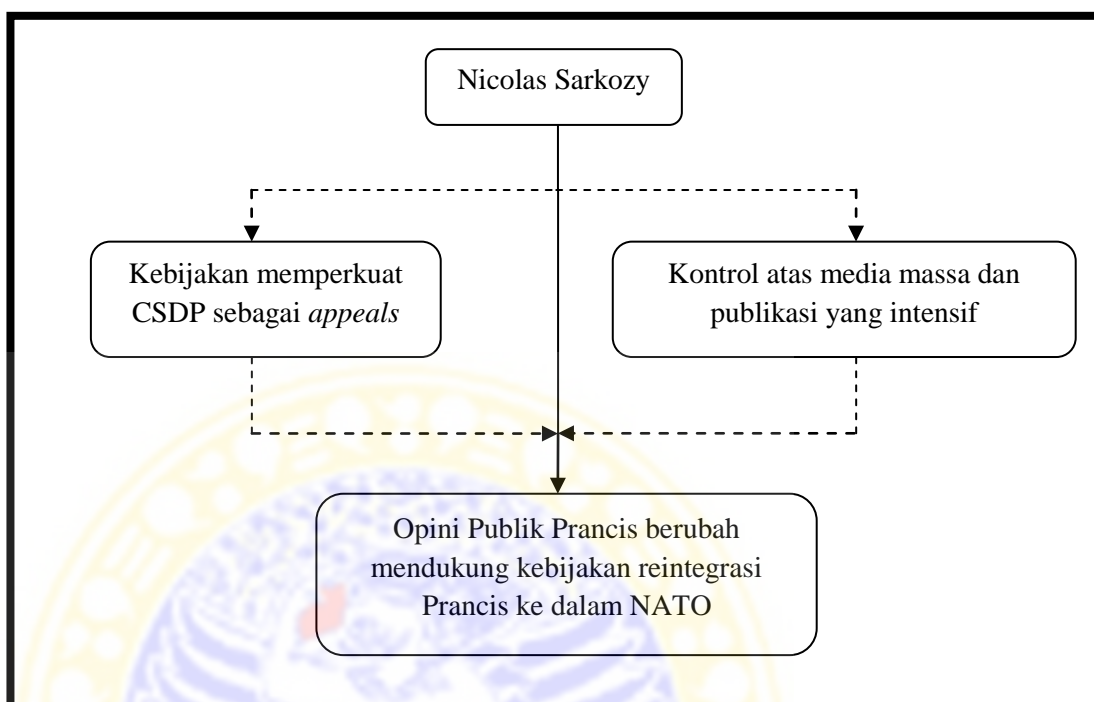
Strategi *public appeals* diterapkan oleh Nicolas Sarkozy semenjak menjabat sebagai Presiden Prancis. Kebijakan memperkuat EU CSDP yang terangkum dalam Perjanjian Lisbon 2008 adalah kebijakan yang menstimulasi pemikiran

opini publik Prancis. Kebijakan tersebut secara konstan mendapatkan dukungan yang tinggi dari opini publik Prancis. Kebijakan tersebut menstimulasi pemikiran opini publik bahwa Nicolas Sarkozy tidak akan menyerahkan independensi Eropa kepada NATO. Tetapi, semakin memperkuat kerjasama militer Eropa tersebut di dalam NATO dan mendorong perkembangan dari CSDP. Hal tersebut dituliskan peneliti pada bab III.

Kemudian pada bab IV, peneliti menuliskan tentang pengaruh Nicolas Sarkozy terhadap media massa Prancis dan publikasi kebijakan reintegrasi Prancis ke dalam NATO dalam media massa. Hal tersebut sesuai dengan konsep pemasaran politik bahwa politisi harus mengkomunikasikan dan mempublikasikan kebijakan atau nilai politisnya ke publik untuk bisa memengaruhi opini publik. Nicolas Sarkozy melakukan hal tersebut untuk memengaruhi opini publik Prancis agar mendukung kebijakan reintegrasi Prancis dalam NATO. Sarkozy yang berkuasa atas media massa Prancis, mempermudah Sarkozy mengkomunikasikan dan mempublikasikan pembenaran dan alasan reintegrasi Prancis ke dalam NATO.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, hipotesis yang ditulis pada bab I terbukti sesuai dengan dengan temuan data. Hasil temuan data dan analisa bisa dioperasikan dalam bagan sistesis kerangka pemikiran sebagai berikut:

### Sintesis Kerangka Pemikiran



Peneliti menemukan beberapa temuan data baru dalam proses pengumpulan data yang antara lain adalah:

1. Nicolas Sarkozy bisa mengontrol media karena mempunyai teman-teman yang menjadi pemilik dari sebagian besar media massa di Prancis.
2. Dari 52% opini publik Prancis yang mendukung kebijakan reintegrasi Prancis ke dalam NATO pada tahun 2009, 70%-nya adalah berusia 17-25.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angus Reid Global Monitor, 2008, '*de Gaulle Best, Sarkozy Worst for French*'. terdapat dalam [http://www.angus-reid.com/polls/31767/de\\_gaulle\\_best\\_sarkozy\\_worst\\_for\\_french/](http://www.angus-reid.com/polls/31767/de_gaulle_best_sarkozy_worst_for_french/), diakses pada [26 April 2012].
- Ateaga, Felix. 2006. *France's Nuclear Deterrence According to President Chirac: Reform, Clean Break or Reminder?*. Real Instituto Elcano, Area of Security and Defense.
- Auxier, Richard C.. 2009. *Few in NATO Support Call for Additional Forces in Afghanistan*. Terdapat dalam <http://pewresearch.org/pubs/1325/little-support-in-nato-for-afghanistan-troop-increases>, diakses pada [2 Mei 2012].
- Bacquet, Gisela M.R. 2009. *France's New NATO Policy: Leveraging a Realignment of the Alliance*. Dalam "The Foreign Policy of USA: President Obama's New Course and the Future of Transatlantic Relations.
- Belkin, Paul. 2011. *France: Factors Shaping Foreign Policy and Issues in US-French Relations*. Congressional Research Service, 7-5700 dalam [www.crs.com](http://www.crs.com) RL32464.
- Benson , Rodney dan Daniel C. Hallin. 2007. *How States, Market and Globalization Shape News: The French and US National Press, 1965-97*. Sage Publications, terdapat dalam <http://ejc.sagepub.com/cgi/content/abstract/22/1/27>, (27-48).
- Biscop, Sven. 2010. *From ESDP to CSDP: Time for some Strategy*. Terdapat dalam <http://www.diploweb.com/From-ESDP-to-CSDP-Time-for-some.html>, diakses pada [4 Maret 2012].
- Bovo, Giovanni. 2002. *European Union Defence and Security Policy: Theoretical Approaches*. The Nice Summit and Hot Issues. Bradford University: Peace Studies Department.
- Bozo, Frederic. 2008. *France and NATO under Sarkozy: End of the French Exception?*. Paris: Working Paper of Foundation Pour L'Innovation Politique.
- Cameron, Alastair dan Jean Pierre Maulny. 2009. *France's NATO Reintegration: Fresh View with the Sarkozy Presidency?*. Royal United Services Institute, Occasional Paper, February 2009.
- Canes-Wrone, Brandice. 2006. *Who Leads Whom? President, Policy and Public Opinion*. Chicago: Chicago University Press.
- Delporte, Christian. 2012. *Sarkozy and The Media, Contemporary French and Francophone Studies*. Routledge, 16:3, h. 299-310, terdapat dalam <http://dx.doi.org/10.1080/17409292.2012.675668>.,



- Eurobarometer 66, 2006, *Public Opinion in European Union: Support For a Common Security And Defense Policy*.
- Eurobarometer, 2003. *Support For Common Foreign and Security Policy (CFSP) is Reinforced*. S.l.
- , 2003. *Support For Common Foreign and Security Policy (CFSP) is Reinforced*. S.l.
- Evans, Graham dan Jeffrey Newnham, 1998. *Dictionary of International Relations*. London: Penguin Group.
- Gill, Lucy. 2009. *French Split Over Rejoining NATO*. Terdapat dalam <http://news.bbc.co.uk/2/hi/7937126.stm>, diakses pada [29 April 2012].
- Grabinski, Grzegorz B.. 2005, *Anti Americanism in Europe: A History Disease*. The Atlantic Obsevers.
- Greene, Nathanael. 2010. *Charles de Gaulle Lagacy: He Was Not Subservient to America*. Online. terdapat dalam <http://www.france24.com/en/20101109-charles-de-gaulle-legacy-france-usa-international-not-subservient>, diakses pada [26 April 2012].
- Grevi, Giovanni et al, 2009. *European Security and Defence Policy The First 10 Years (1999-2009)*. EU Institute for Security and Defence Policy.
- Hall, Irwin M. n.d. *The French-American War Over Iraq*. New York University: Center for European Studies.
- Heald, Emma. 2010. *Does Sarkozy Exert to Much Influence Over The French Media*. Terdapat dalam <http://www.editorsweblog.org/2010/07/05/does-sarkozy-exert-too-much-influence-over-the-french-media>, dikases pada [21 Mei 2012].
- Holsti, Ole R. 2004. *Public Opinion and American Foreign Policy*. University of Michigan Press.
- Howorth, Jolyon. 2002. *France, NATO and European Security: Status Quo Unsustainable; New balance Unattainable*. French Institute of International Relations.
- Hughes, Andrew dan Stephen Dann, 2009. *Political Marketing and Stakeholder Engagement*. terdapat dalam <http://mtq.sagepub.com/content/9/2/243>.
- Irondelle, Bastian dan Frederic Merand 2010. *France's Return to NATO: Death Knell for ESDP?*. Dalam *European Security* Vol.19, No. 1, Maret 2010, h. 29-43. London: Routkedge.
- Jacobs, R. L. & R. Y. Shaprio, 2000. *Politicians don't pander: Political manipulation and the loss of democratic responsiveness*. Chicago: University of Chicago Press, terdapat dalam Brandon Rottinghaus, 2008, *Presidential Leadership on Foreign Policy, Opinion Polling and the Possible Limits of "Crafted Talk"*, *Political Communication*, 25: 138-157, Taylor and Francis Group..

- Jaquemet, Olivier. 2012. *Some Thought After 4 French Soldiers Dies in Afghanistan*. Terdapat dalam <http://echo-sierra.net/2012/01/22/some-thoughts-after-4-french-soldiers-died-in-afghanistan/>, diakses pada [2 Mei 2012].
- Klawitter, Nils dan Stefan Simons. 2008. *Sarkozy Moves to Control French Media*. Terdapat dalam <http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,565062,00.html>, diakses pada [20 Mei 2012].
- Kuhn, Raymond. 2010. "Les Medias, C'est Moi", *Presidential Media Management in Sarkozy's France*. London: Queen Mary University, (1-16).
- Lacorne, Denis. 2005. *Anti-Americanism and Americanophobia: A French Perspective*. s.l.
- Lippman, Walter. 1991. *Public Opinion*. New Jersey: Transaction Publisher.
- London, Scott. 1993. *How the Media Frames Political Issues*. Terdapat dalam <http://www.scottlondon.com/reports/frames.html>, diakses pada [15 Mei 2012].
- Menon, Anand. 1995. *From Independence to Cooperation: France, NATO and European Security*. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 71, No. 1(Jan., 1995).
- Merchet, Jean-Dominique. 2011. *72% Des Francais Opposes a l'Intervention Militaire Francais en Afghanistan*. Terdapat dalam [http://www.marianne2.fr/blogsecretdefense/72-des-Francais-opposes-a-l-intervention-militaire-francaise-en-Afghanistan\\_a140.html](http://www.marianne2.fr/blogsecretdefense/72-des-Francais-opposes-a-l-intervention-militaire-francaise-en-Afghanistan_a140.html), diakses pada [3 Mei 2012].
- Meunier, Sophie. 2005. *Anti Americanism in France*. Princeton University: European Studies of Newsletter Vol.XXXV n.r. ¾ January 2005.
- Missiroli, Antonio. 2008. *The Impact of The Lisbon Treaty on ESDP*. European Parliament, terdapat dalam <http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?languageEN>, diakses pada [3 Mei 2012].
- Mueller, John E.. "Public Opinion." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008.
- Navarro, Luis S. 2008. *Sarkozy's Dilemmas, The Forthcoming EU Presidency and ESDP: What's in it Europe?*. Real Instituto Elcano, Area: Eropé ARI 76/2008, 7 Juli 2008.
- Newman, Bruce I. n.d. *Political Marketing*. Chicago: De Paul University.
- Newman, Bruce I, dan Richard M. Perloff, 2004. *Political Marketing: Theory, Research and Application* dalam Lynda Lee Kaid, 2004, *Handbook of Political Communication Research*. London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

- Ortiz, Antonio. 2007. *Sarkozy's Defence Policy: A Early Look*. Real Instituto Elcano, Area: Security and Defence, ARI 69/2007, 21/6/2007.
- Panagoret, Ioano. 2010. *European Policy of General Charles de Gaulle in the French Public Opinion*. University of Targoviste.
- Pemerintah Republik Prancis, *White Paper Policy*, 2008.
- Pew Research Center. 2010. *Pew Global Attitudes Project: Opinion of The United States 2006-2009*. Terdapat dalam <http://www.pewglobal.org/database/?indicator=1&survey=10&response=Favorable&mode=chart>, diakses pada [27 Mei 2012].
- , 2010. *Pew Global Attitudes Project: Support for War in Afghanistan 2007-2009*. Terdapat dalam <http://www.pewglobal.org/database/?indicator=9&survey=10&response=Keep%20troops%20in%20Afghanistan&mode=chart>, diakses pada [27 Mei 2012].
- , 2010. *Pew Global Attitudes: Opinions of The United States 2008*. Online. terdapat dalam <http://www.pewglobal.org/database/?indicator=1&survey=9&response=Favorable&mode=chart>, diakses pada [2 Mei 2012].
- , 2010. *Pew Global Attitudes: Opinions of The United States 2009*. Online. terdapat dalam <http://www.pewglobal.org/database/?indicator=1&survey=9&response=Favorable&mode=chart>, diakses pada [2 Mei 2012].
- , 2011. *Pew Global Attitudes: Opinions of NATO 2010-2011*. Terdapat dalam <http://www.pewglobal.org/database/?indicator=37&survey=13&response=Favorable&mode=chart>, diakses pada [2 Mei 2012].
- , 2011. *Pew Global Attitudes: Supports for War on Afghanistan 2011*. Terdapat dalam <http://www.pewglobal.org/database/?indicator=9&survey=13&response=Keep%20troops%20in%20Afghanistan&mode=chart>, diakses pada [2 Mei 2012].
- , 2011. *Pew Global Attitudes: Supports for War on Afghanistan 2011*. Terdapat dalam <http://www.pewglobal.org/database/?indicator=9&survey=13&response=Keep%20troops%20in%20Afghanistan&mode=chart>, diakses pada [2 Mei 2012].
- Rozenberg, Olivier. n.d. *La PESC Vue Par l'Opinion Publique Francaise et Europeenne*. L'Intitut d'Etudes Politiques de Paris.
- Schofield, Hugh. 2012. *Nicolas Sarkozy: Why is the French President is so Dislike?*. terdapat dalam <http://m.bbc.co.uk/news/magazine-17775249>, diakses pada [26 April 2012].



- Soroka, Stuart N. 2003. *Media, Public Opinion and Foreign Policy*. The President and The Fellows of Harvard College.
- Stratford-Wright, K.P.. n.d. *Public Opinion, the Media, Informations, Propaganda, and Media Operations*. Terdapat dalam <http://ics-www.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&folder=66&paper=2249>, diakses pada [10 Mei 2012].
- Taylor, Claire. 2006. *European Security and Defence Policy: Developments Since 2003*. House of Common Library, Research Paer 06/32, 8 Juni 2006.
- Terzis, Giorgios. 2008. *European Media Governance: National and Regional Dimensions*. Bristol: Intellect Books, terdapat dalam <http://www.intellectbooks.co.uk/books/view-Book,id=4601/>.
- Vaisse, Justin, 2008. *Nicolas Sarkozy's Foreign Policy: Gaullist by Any Other Name*. The International Institute for Strategies Studies, terdapat dalam [www.informaworld.com/survival](http://www.informaworld.com/survival).
- Valasek, Tomas. 2007. *The Roadmap of Better EU-NATO Relations*. Centre for European Reforms.
- Valenzuela, Julia. "Communication". 30 Juli 2002. Terdapat dalam <http://www.unm.edu/~devalenz/handouts/defcomm.html> [23 Mei 2012].
- Van Herpen, Marcel H. 2008. *Sarkozy, France and NATO: Will Sarkozy's Rapprochement to NATO be Sustainable?*. terdapat dalam <http://www.nationalinterest.org/Article.aspx?id=17514>.
- Van Herpen, Marcel H. 2009. *Why France Rejoins NATO: Wooing Britain?*. Cicero Foundation Great Debate Paper No. 09/11.
- Vedrine, Hubert. 2004. *On Anti Americanism*. terdapat dalam *Anti Americanism*. The Brown Journal of World Affairs Vol. X, Issue 2.
- Willis, Willian J.. 2007. *Come Closer? The Ambiguous Relationship between Media and Poltics*. Dalam wawancara oleh Natalie Serfozo. Terdapat dalam [http://asjournal.zusas.uni-halle.de/op/wss2007\\_1/45.html](http://asjournal.zusas.uni-halle.de/op/wss2007_1/45.html), diakses pada [16 Mei 2012].
- Winn, Neil. 2003. *CFSP, CSDP and the Future of European Security: Whither NATO?*. The Brown Journal of World Affairs, Winter/ Spring, 2003-Vol. IX, Issue 2
- Zatuliveter, Katia. 2009. *France's Changing Role in NATO*. Terdapat dalam <http://www.defenceviewpoints.co.uk/articles-and-analysis/france-s-changing-role-in-nato>, diakses pada [27 Pebruari 2012].
- "A Closer Look: Definition of Communication". (n.d.). 20 Mei 2012, terdapat dalam <http://reference.yourdictionary.com/word-definitions/definition-of-communication.html>, diakses pada [23 Mei 2012].
- "About ISAF". 2012. Terdapat dalam <http://www.isaf.nato.int/mission.html>, diakses pada [2 Mei 2012].

- “*appeal*”. (n.d.). *Easton's 1897 Bible Dictionary*. May 22, 2012, dari Dictionary.com website: <http://dictionary.reference.com/browse/appeal>, diakses pada [23 Mei 2012].
- “*Charles de Gaule: A Life of Political Influence*”. 2010. Terdapat dalam <http://www.france24.com/en/20101109-charles-de-gaule-life-political-influence-timeline-france>, diakses pada [26 April 2012].
- “*Common Security and Defence Policy*”. 2010. Terdapat dalam [http://europa.eu/legislation\\_summaries/institutional\\_affairs/treaties/lisbon\\_treaty/ai0026\\_en.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0026_en.htm), diakses pada [22 Pebruari 2012].
- “*Engaging With The Media-Sarkozy Style*”. 2010. Terdapat dalam <http://news.bbc.co.uk/2/hi/8826485.stm#blq-main>, diakses pada [21 Mei 2012].
- “*EU Common Security and Defence Policy*”. 2011. Terdapat dalam <http://www.civitas.org.uk/eufacts/FSEX/EX4.htm>, diakses pada [22 Pebruari 2012].
- “*France Country Profile*”. 2012. Terdapat dalam [http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country\\_profiles/998481.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/998481.stm), diakses pada [18 Mei 2012].
- “*France Press, Media, TV, Radio, Newspaper*”. 2012. Terdapat dalam <http://www.pressreference.com/Fa-Gu/France.html>, diakses pada [18 Mei 2012].
- “*France rejoining NATO command good news for Moscow*”. 2009. Terdapat dalam <http://rt.com/usa/news/france-rejoining-nato-command-good-news-for-moscow/>, diakses pada [15 Januari 2012].
- “*IFOP Group in Brief*”. Terdapat dalam [http://www.ifop.com/?option=com\\_in\\_brief](http://www.ifop.com/?option=com_in_brief), diakses pada [26 Mei 2012].
- “*Iran Threat “Unacceptable”, Said Sarkozy*”. 2011. Terdapat dalam <http://www.france24.com/en/20111121-sarkozy-unprecedented-sanctions-iran-iaea-report-nuclear-programme-france>, diakses pada [19 Februari 2012].
- “*Pidato Nicolas Sarkozy di Kongres AS*”. 7 November 2007. <http://www.elysee.fr/edito/index.php?id=23>. Terdapat dalam Gisela M.R. Bacquet. 2009. *France’s New NATO Policy: Leveraging a Realignment of the Alliance*. Dalam “*The Foreign Policy of USA: President Obama’s New Course and the Future of Transatlantic Relations*”.
- “*Public Opinion on CSDP*”. 2010. Terdapat dalam [http://ec.europa.eu/public\\_opinion/cf/showchart\\_column.cfm?keyID=2253&nationID=6.&startdate=2007.05&enddate=2007.05](http://ec.europa.eu/public_opinion/cf/showchart_column.cfm?keyID=2253&nationID=6.&startdate=2007.05&enddate=2007.05), diakses pada [6 Mei 2012].



- “*Public Opinion*”. 2012. In *Encyclopædia Britannica*. Terdapat dalam <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/482436/public-opinion>, diakses pada [26 Mei 2012].
- “*Qui Sommes-Nous?*”. 2012. Terdapat dalam <http://www.tns-sofres.com/qui-sommes-nous/>, diakses pada [26 Mei 2012].
- “*Sarkozy and The Media*”. 2011. Terdapat dalam <http://pennpoliticalreview.org/2011/01/sarkozy-and-the-media/>, diakses pada [21 Mei 2012].
- “*Support among NATO Countries Mixed (57%)*”. 2011. Terdapat dalam <http://www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=5234>, diakses pada [15 Januari 2012].
- “*The Transfer of Ownership of The Group Les Echos*”. n.d. Terdapat dalam <http://www.aircountry.info/voyages/the-transfer-ownership-group-les-echos-les-echos-lesechos.php>, diakses pada [26 Mei 2012].
- “*Les Medias, Un Quatrieme Pouvoir?*”. n.d. Terdapat dalam <http://media-et-politique.e-monsite.com/pages/les-medias-un-quatrieme-pouvoir.html>, diakses pada [15 Mei 2012].

